

# **BAB VI**

## BAB VI

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU

#### A. Strategi Pembangunan Provinsi Riau

Perumusan langkah-langkah untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pada RPJMD ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) seperti terlihat pada Tabel 6.1. Isu strategis pada kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan telah diuraikan pada Bab IV Analisa Isu-Isu Strategis.

Tabel 6.1

Penetapan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau  
Dengan Pendekatan SWOT

Isu Strategis	Strategi dan Arah Kebijakan	Peluang	Tantangan
<b>Kekuatan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Letak wilayah strategis</li><li>Kapasitas pemerintahan semakin baik</li><li>Suasana keamanan, sosial dan politik kondusif</li><li>Kaya SDA</li><li>Perkebunan dan pertanian subur</li><li>Budaya Melayu sebagai kekayaan daerah</li></ul>	<b>Kekuatan-Peluang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Revitalisasi pertanian</li><li>Meningkatkan investasi dan ekspor</li><li>Budaya Melayu sebagai payung negeri</li><li>Melaksanakan PON XVIII tahun 2012</li></ul>	<b>Peluang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Lingkungan Strategis</li><li>Perkembangan Politik Nasional Dinamis dan Positif</li><li>Eratnya hubungan kerjasama regional</li></ul>	<b>Tantangan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Isu lingkungan hidup</li><li>Globalisasi</li><li>Dinamika dan fluktuasi keadaan ekonomi</li><li>Kebijakan pemerintah pusat yang berubah-ubah</li></ul>
<b>Kelemahan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tanah rawa dan gambut</li><li>Kemiskinan</li><li>SDM rendah</li><li>Hukum tidak konsisten</li><li>Tumpang tindih lahan</li><li>Degradasi lingkungan hidup</li><li>Distribusi penduduk dan pembangunan tidak merata</li><li>Infrastruktur terbatas</li></ul>	<b>Kelemahan-Peluang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan SDM</li><li>Mengentaskan kemiskinan</li><li>Membangun infrastruktur</li><li>Pembangunan Pedesaan</li></ul>	<b>Kekuatan-Tantangan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan tata pemerintahan yang baik</li></ul>	<b>Kelemahan-Tantangan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup</li></ul>

---

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Riau dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan *Pro Growth*; Orientasi pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan investasi dunia usaha dan masyarakat;
2. Pendekatan *Pro Job*; Menciptakan investasi yang mapan untuk menjamin kesempatan kerja permanen, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan membuka peluang kerja;
3. Pendekatan *Pro Poor*; Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dengan pendidikan dan keterampilan yang dilandasi IPTEK dan IMTAQ untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau.

## B. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Riau khususnya terhadap kebijakan prioritas diwujudkan melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dengan perhatian utama pada pelayanan dasar pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang dapat mendorong Link and Match antara dunia pendidikan dengan pasar kerja, disamping meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan melalui perbaikan layanan, peningkatan penyediaan sarana/prasarana kesehatan serta peningkatan penyediaan dan peningkatan kompetensi tenaga medis di Rumah Sakit, Puskesmas dan Pos Pelayanan Kesehatan di pedesaan dll. Sedangkan berkenaan dengan ketenagakerjaan lebih ditekankan pada upaya pendekatan ketrampilan kerja dan mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta penguatan Iman dan Taqwa (IMTAQ) melalui pendekatan keagamaan baik dalam bentuk jenjang pendidikan formal maupun melalui informal (dakwah, pengajian dll);
2. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pendekatan utama dilakukan melalui penguatan asset ekonomi baik melalui perlindungan/jaminan sosial ekonomi masyarakat, penguatan asset produktif serta kredit usaha rakyat yang diperlukan dengan perluasan net working pasar, penguasaan teknologi dan pemberdayaan koperasi serta UKM dalam menunjang pengembangan Agro Bisnis dan Agro Industri;

- 
3. Penyediaan infrastruktur dalam upaya mendukung peningkatan investasi, pemerataan pembangunan dan pelayanan kebutuhan masyarakat di wilayah perkotaan, pedesaan, pedalaman, wilayah pesisir, daerah kepulauan, perbatasan, daerah aliran sungai serta penguatan Kawasan Andalan yaitu pusat kegiatan nasional (PKN) pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (Lokal) dalam bentuk infrastruktur jalan/jembatan, air bersih, listrik, perhubungan darat, laut dan udara, perumahan dan lain-lain.
  4. Melaksanakan revitalisasi pertanian melalui kerjasama daerah antar Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dengan sasaran pokok mengembangkan agribisnis sistem terpadu, penggunaan teknologi tepat guna, serta reinventing manajemen permodalan yang diimplementasikan dalam program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) untuk mencapai swasembada pangan dan atau mengurangi ketergantungan pangan dari luar Provinsi Riau. Kemudian melakukan agribisnis peternakan, budidaya perikanan dan agribisnis pekerbunan yang diarahkan untuk pengembangan perkebunan dan revitalisasi kebun tua;
  5. Peningkatan investasi dunia usaha melalui regulasi perizinan seperti pelayanan satu atap (*one stop – service*), complain board, penguatan promosi investasi, serta dukungan pelayanan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi baik dalam upaya berkembangnya kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, perdagangan dan sebagainya, yang berpengaruh pada peluang dan kesempatan kerja serta bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat;
  6. Pelaksanaan PON XVIII Tahun 2012 dengan mempersiapkan sarana, prasarana fisik serta pembinaan atlet. PON XVIII yang akan dilaksanakan di sejumlah tempat di Provinsi Riau dengan capaian target sukses yakni (1) sukses pelaksanaan dan prestasi; (2) sukses penguatan ekonomi masyarakat; dan (3) sukses menggalakan wisata;
  7. Terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance and Clean Government*) dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat; penegakan dan perlindungan hukum dan HAM; mendukung dan melanjutkan upaya pelaksanaan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi, penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan kondisi rukun antar umat beragama;

- 
8. Peningkatan kinerja aparatur baik dalam upaya mendorong peningkatan produktivitas kerja, disiplin dan ethos kerja serta memperkuat upaya terciptanya aparatur pemerintah yang baik, berwibawa dan akuntabel;
  9. Mewujudkan Kebudayaan Melayu sebagai akar jati diri masyarakat Riau serta sebagai payung negeri untuk mempersatukan budaya lainnya yang ada di Provinsi Riau. Pengembangan dan pelestarian menempatkan Provinsi Riau sebagai pusat bahasa dan dokumentasi melayu, serta pusat pendidikan melayu yang diaktualisasikan melalui lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan lainnya melalui pembinaan simbol-simbol, pranata, pewarisan yang diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat;
  10. Mengoptimalkan pengembangan potensi pariwisata. Arah kebijakannya adalah membangun objek-objek wisata unggulan di setiap Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dan penyelenggaraan event-event pariwisata bertaraf nasional dan internasional;
  11. Pembangunan pedesaan yang diarahkan untuk mengimplementasikan otonomi desa secara bertahap dengan membuat peraturan sebagai payung hukum (Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah), pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam upaya mengurus aset dan mengembangkan diri secara mandiri. Arahan kebijakan di sini adalah mewujudkan penyelenggaraan desa yang demokratis, transparan, akuntabel dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian lembaga pemerintah desa, lembaga adat dan lembaga lainnya disamping upaya penguatan infrastruktur pedesaan yaitu infrastruktur jalan desa, air bersih pedesaan, listrik desa dan rumah sederhana layak huni dan sebagainya;
  12. Melestarikan lingkungan hidup dengan memantapkan sistem koordinasi, sosialisasi dan penegakan hukum serta melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan pada aktivitas penanganan banjir, masalah kebakaran, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta pelestarian lingkungan hidup baik melalui rehabilitasi maupun konservasi lahan kritis, gambut, hutan suaka margasatwa dan sebagainya.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan lainnya merupakan bahagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya, dan ditetapkan dalam kebijakan umum pada program pembangunan lainnya.

# **BAB VII**

## BAB VII

### KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Riau lima tahun ke depan merupakan kelanjutan kebijakan pembangunan sebelumnya. Secara rinci akan dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan seperti dituangkan berikut:

Tabel 7.1  
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Riau  
Tahun 2009-2013

NO	MISI	KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	SKPD PELAKSANA
1	Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang profesional dan bermoral melalui keteladanan pemimpin dan aparatur	1. Menata dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan  2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur pemerintahan  3. Mewujudkan profesionalisme, moralitas, nilai-nilai agama dan budaya, serta keteladanan aparatur penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Penataan peraturan perundang-undangan, dengan target sasaran tertatanya peraturan perundang-undangan secara baik di Prov. Riau  2. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan target sasaran meningkatnya kualitas, kompetensi aparatur daerah  3.1. Pembinaan dan pengembangan aparatur dengan target sasaran; Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas aparatur, Meningkatnya moralitas kinerja serta Optimalnya pengamalan nilai-nilai agama dan budaya  3.2. Peningkatan kualitas kinerja aparatur melalui pendidikan kedinasan dengan sasaran meningkatnya kualitas kinerja aparatur yang profesional  3.3. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan	Setda  BKD Setda  BKD  BKD Badan Penghubung  Inspektorat

			naan kebijakan Kepala Daerah dengan target sasaran terlaksananya pengendalian kebijakan dan terevaluasinya kebijakan Kepala Daerah	Bappeda
		3.4. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan target sasaran meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, serta berkurangnya penyimpangan pelaksanaan program pembangunan	Inspektorat Prov	
	4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD;	4. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;	Sekretaris DPRD	
	5. Meningkatkan kualitas dan pengelolaan keuangan daerah	5.1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah; 5.2. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota melalui koordinasi, kerjasama di dalam pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Biro Keuangan Dinas Pendapatan	
	6. Menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;	6. Pemanfaatan teknologi informasi di dalam pemerintahan daerah untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik;	Setda  Setda  Dinas KI-PDE	
	7. Meningkatkan intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat;	7. Penanganan pengaduan masyarakat dengan target sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pengawasan pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik dalam memberikan masukan pada pemerintah provinsi;	Inspektorat,  Badan Kesbang Polinmas	
	8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	8.1. Pengembangan data/Informasi, dengan sasaran menyediakan data dan informasi yang tertata dengan baik, serta mudah diakses untuk mendapatkan data dan informasi pembangunan oleh stakeholder pembangunan; 8.2. Optimalisasi kerjasama pembangunan dengan mewujudkan kerjasama dan koordinasi pembangunan baik antar pemerintah daerah, pemerintah pusat,	Dinas KI-PDE  Bappeda  Bappeda  Setda  Badan Penghubung	

			swasta, dan masyarakat;	
		8.3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah dengan sasaran meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;	Bappeda	
	9. Memperbaiki sistem administrasi kearsipan	9. Perbaikan sistem administrasi kearsipan dengan menata sistem administrasi kearsipan;	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	10. Menyelamatkan dan melestarikan dokumen /arsip daerah	10. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah dengan sasaran meningkatkan kelestarian dokumen/arsip daerah;	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	11. Meningkatkan kerjasama dengan media massa dalam menyebarluaskan informasi pembangunan	11. Peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan informasi kearsipan;	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
	12. Mengembangkan wahana komunikasi, informasi, dan media massa;	12. Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa dengan sasaran mengembangkan komunikasi, informasi via media massa secara berkelanjutan;	Setda Dinas KI-PDE	
	13. Mengkaji dan meneliti bidang informasi dan komunikasi;	13.1. Peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi, 13.2. Pengkajian dan penelitian informasi dan komunikasi dengan sasaran mengkaji/melakukan penelitian bidang informasi dan komunikasi.	Setda Dinas KI-PDE  Balitbang Setda, Dinas KI-PDE	
2	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai kelanjutan pengentasan kebodohan	1. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan;	1.1. Pendidikan anak usia dini dengan sasaran meningkatkan APK bagi pendidikan anak usia dini (PAUD); 1.2. Wajib belajar pendidikan dasar peningkatan daya tampung, beasiswa bagi anak tidak mampu dan melaksanakan pendidikan anak marginal dg meningkatkan APK/APM SD/MI,dan meningkatkan SMP/MTs; 1.3. Pendidikan Menengah dengan peningkatan daya tampung, pembe-	Dinas Pendidikan  Dinas Pendidikan  Dinas Pendidikan

			rian beasiswa bagi anak tidak mampu dan berprestasi sehingga, meningkatkan APK/APM SMA/MA/SMK, SBI, dan relevansi Life Skill.	
		2. Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;	2.1. Peningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan dengan meningkatkan kompetensi, kesejahteraan dan kebutuhan guru, Juga melaksanakan SSN/SBI penggunaan ICT dan optimalkan perpustakaan	Dinas Pendidikan
			2.2. Program pendidikan tinggi dengan memberikan bantuan beraswa bagi siswa berprestasi dan keluarga tidak mampu	Dinas Pendidikan
			2.3. Program pendidikan non formal, dengan mengurangi angka buta aksara, meningkatkan APK PAUD, partisipasi non formal, Paket A, B dan C peningkatan kualitas PKBM & lemb kursus;	Dinas Pendidikan
			2.4. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendidikan dengan mendorong otonomi sekolah;	Dinas Pendidikan
			2.5. Pendidikan Luar Biasa dengan memberikan fasilitas dan meningkatkan kreativitas	Dinas Pendidikan
			2.6. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Diklat kompetensi, Pendidikan Kualifikasi dan Forum Guru/Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan
		3. Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat;	3. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dengan meningkatkan kelembagaan perpustakaan desa/kelurahan, meningkatkan kualitas tenaga perpustakaan, koleksi bacaan, serta frekwensi kunjungan;	Dinas Pendidikan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
		4. Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi;	4. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dengan memberdayakan perpustakaan umum kab/kota dan meningkatkan layanan perpustakaan keliling berbasis teknologi informasi dan komputer;	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
		5. Mendorong tercapainya Indonesia sehat	5. Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan	Dinas Kesehatan

		melalui peningkatan kualitas kesehatan lingkungan serta pengawasan peredaran makanan dan obat di Provinsi Riau;	pemerataan dan keterjangkauan harga, menurunkan jumlah penderita penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan yang tidak sehat;	RSUD RS Jiwa
		6. Meningkatkan pembangunan bidang kesehatan di desa-desa, baik obat-obatan, tenaga medis serta sarana dan prasarana lainnya;	6. Program upaya kesehatan masyarakat dengan meningkatkan komitmen dan kemampuan kab/ko untuk mencapai desa siaga dan perilaku hidup bersih dan sehat;	Dinas Kesehatan
		7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan harga yang sesuai dg kemampuan masyarakat di RSUD;	7.1. Program manajemen pelayanan kesehatan dg menyediakan pembinaan kesehatan di prov dan kab/kota dalam jumlah mencukupi untuk memenuhi standar mutu;	Dinas Kesehatan RSUD RS Jiwa
			7.2. Program sumber daya kesehatan dengan meningkatkan jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan yang sesuai dengan standar, meningkatkan pendayagunaan aparatur kesehatan, meningkatkan kualitas tenaga kesehatan,	Dinas Kesehatan RSUD
			7.3. Pengawasan obat dan makanan dengan meningkatkan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan;	Dinas Kesehatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			7.4. Pengembangan Obat Asli Indonesia melalui Litbang Teknologi Produksi Tanaman Obat	Dinas Kesehatan
			7.5. Program upaya kesehatan masyarakat, dengan meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas di daerah pedesaan;	Dinas Kesehatan Badan PMPD
			7.6. Pengadaan dan peningkatan sarana prasarana rumah sakit dengan meningkatkan kapasitas tempat tidur RSUD sebagai pusat rujukan rawat inap untuk Provinsi Riau;	RSUD
		8. Memperbaiki gizi masyarakat dan memberantas penyakit menular	8.1. Perbaikan gizi masyarakat dengan menurunkan jumlah penderita gizi buruk dan memberikan kesadaran untuk memakan makanan yang berisi, sehat dan bersih;	Dinas Kesehatan
			8.2. Pencegahan & penanggulangan penyakit menular dengan mengoptimalkan fungsi rumah sakit/puskesmas dan	Dinas Kesehatan

			meningkatkan upaya penanggulangan penyakit secara cepat;	
		9. Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Bayi serta meningkatkan kesehatan anak balita dan Lansia	9.1. Peningkatkan keselamatan ibu melahirkan dan Keselamatan anak, terutama dari keluarga kurang mampu;	Dinas Kesehatan Badan Pemberdayaan Perempuan PA & KB
			9.2. Peningkatkan pelayanan kesehatan anak balita dengan menurunkan jumlah kematian anak, meningkatkan persentase pela-yanan kesehatan anak balita, serta menurunkan kasus kesehatan dan gizi anak balita;	Dinas Kesehatan. Badan Pemberdayaan Perempuan, PA dan KB
			9.3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dengan membangun pusat-pusat layanan panti asuhan	Dinas Kesehatan.
		10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin;	10. Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin dg menjamin stiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar & atau rujukan/ spesialistik bermutu;	Dinas Kesehatan Badan PMPD
		11. Mewujudkan pusat rujukan Kesehatan;	11.1. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, dengan sasaran peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan;	Dinas Kesehatan RS Jiwa
			11.2.Pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, dengan sasaran meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;	Dinas Kesehatan RSUD RS Jiwa
		12. Meningkatkan upaya pelaksanaan sistem infromasi administrasi kependudukan (SIAK) secara terpadu dan terkoordinasi;	12. Penataan administrasi kependudukan, dengan sasaran terlaksana SIAK secara terpadu dan terkoordinasi di seluruh Kabupaten/Kota dan tersedianya data kependudukan yang akurat, valid dan mutakhir;	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
		13. Meningkatkan upaya penataan dan pengendalian mobilitas penduduk;	13.1 Penataan dan Pengendalian mobilitas penduduk, dengan sasaran adanya penyebaran penduduk yang lebih merata sesuai dengan daya dukung lahan dan ketersediaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

		infrastruktur;	
		13.2 Pengembangan Wilayah Transmigrasi; Lokal dan Regional	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
	14. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;	14. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan tentang standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja; pemagangan, dan pembinaan lembaga pelatihan tenaga kerja swasta dan pemerintah;	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
	15. Meningkatkan kesempatan kerja;	15. Peningkatan kesempatan kerja yang difasilitasi oleh instansi pemerintah dan swasta untuk membuka peluang kerja padat karya;	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Dinas Koperasi & UKM
	16. Meningkatkan pelaksanaan peraturan daerah tentang penempatan tenaga kerja lokal	16. Peningkatan Kesempatan Kerja dengan sesuai dengan peraturan daerah dan Terfasilitasinya penempatan tenaga kerja lokal di perusahaan swasta sesuai dengan peraturan daerah;	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
	17. Mendorong dan memfasilitasi angkatan kerja agar menjadi wirausaha tangguh;	17. Peningkatan kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja wirausahawan;	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Dinas Koperasi & UKM
	18. Memperkuat lembaga ketenagakerjaan	18. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan melalui penyelesaian hubungan industrial; Sistem pengupahan; Pemberdayaan sarana hubungan industrial dan Memfasilitasi perlindungan tenaga kerja terhadap naskah kontrak kerja;	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan  Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	19. Melanjutkan upaya pengentasan kemiskinan;	19. Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk menurunkan angka kemiskinan.	Dinas Sosial Setda
	20. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);	20.1 Pelayanan dan Rehabilitasi kesra sosial dengan meningkatkan upaya antisipasi terhadap dampak negatif dari pemulangan TKI dari	Dinas Sosial Dinas Naker Transkep Setda Badan

			<p>Malaysia melalui Provinsi Riau, Menjamin pelayanan/ perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksplorasi perempuan</p>	Pemberdayaan Perempuan, PA & KB
			<p>20.2 Pembinaan Anak Terlantar dengan meningkatkan Keterampilan dan Kemampuan Anak terlantar dan Anak nakal;</p>	Dinas Sosial Dinas Naker Transkep Badan Pemberdayaan Perempuan, PA & KB
			<p>20.3 Pembinaan Penyendang Cacat dan Trauma</p>	Dinas Sosial
			<p>20.4 Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo</p>	Dinas Sosial
			<p>20.5 Pembinaan Eks Penyandang penyakit sosial dengan sasaran Eks Narapidana, PK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya</p>	Dinas Sosial
	<p>21. Memperkuat kesiapan dalam penanggulangan bencana alam dan berbagai dampak yang terjadi;</p>	<p>21. Penanggulangan bencana alam dan perlindungan masyarakat dengan menyediakan bantuan tanggap darurat bencana; Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana;</p>	<p>Dinas Sosial Badan Kesbang Polinmas.</p>	
	<p>22. Memperkuat lembaga pemberdayaan kesejahteraan sosial</p>	<p>22.1 Pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial dengan meningkatkan partisipasi sosial (karang taruna, pekerja sosial masyarakat, dan organisasi sosial) dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial;</p> <p>22.2 Pengelolaan Areal Pemakaman dengan menyediakan sarana dan prasana serta perizinan</p>	<p>Dinas Sosial Dinas Pemuda dan Olahraga Biro Kesra Setda</p>	
	<p>23. Mengembangkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);</p>	<p>23. Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dengan meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama di kalangan masyarakat desa dan tempat terpencil</p>	<p>Dinas Pendidikan, Badan Kesbang Polinmas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa</p>	
	<p>24. Meningkatkan implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat;</p>	<p>24. Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dengan meningkatkan fungsi rumah ibadah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat;</p>	<p>Biro Kesra Badan Kesbang Polinmas</p>	
	<p>25. Meningkatkan pendidikan agama dan kegiatan keagamaan serta</p>	<p>25. Pembinaan lembaga sosial dan keagamaan dengan meningkatkan kualitas pelayanan</p>	<p>Dinas Sosial Biro Kesra</p>	

	pelayanan ibadah haji;	ibadah haji;	
26. Meningkatkan upaya implementasi kesalehan sosial di kalangan aparatur pemerintah;	26. Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama aparatur pemerintah dalam memecahkan persoalan-persoalan sosial keagamaan;	Dinas Sosial Biro Kesra	
27. Memberdayakan perempuan berdasarkan kemandirian berusaha;	27. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;	Badan Pemberdayaan Perempuan, PA & KB	
28. Melindungi anak dan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi;	28. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak dengan mengurangi kekerasan rumah tangga	Badan Pemberdayaan Perempuan, PA & KB	
29. Mengembangkan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;	29. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak dengan meningkatkan pemahaman IRT terhadap pembinaan tumbuh kembang anak dan peran organisasi perempuan;	Badan Pemberdayaan Perempuan, PA & KB	
30. Membina keluarga supaya sejahtera lahir dan bathin;	30. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak dengan melakukan pembinaan keluarga sejahtera lahir dan bathin,	Badan Pemberdayaan Perempuan, PA & KB	
31. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan kelembagaan pemuda;	31. Peningkatan peran serta kepemudaan dg meningkatkan aksi bhakti sosial kepemudaan; kegiatan pendidikan dan latihan kepemimpinan, dan kegiatan pembinaan kepemudaan;	Dinas Pemuda dan Olahraga	
32. Mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda;	32.1 Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;	Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Koperasi & UKM	
	32.2 Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda, membina dan memasyarakatkan olahraga masyarakat.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kantor Satpol PP	
33. Membina olahraga masyarakat;	33. Pembinaan dan memasyarakatkan olahraga untuk mengidentifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga;	Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan	
34. Mensukseskan pelaksanaan PON XVIII Tahun 2012 di Riau;	34. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga dg membangun sarana dan prasarana olahraga untuk penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 di Riau serta memelihara sarana dan prasarana olahraga secara rutin pasca pelaksanaan.	Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pekerjaan Umum	

3	Memperkuat keselimbangan pembangunan antar-wilayah sebagai kelanjutan pembangunan infrastruktur	1. Meningkatkan kerjasama pembangunan antar kab/kota, provinsi, nasional dan internasional dalam penyediaan layanan publik, ekonomi, penanaman modal, hukum, dan sarana prasarana publik;	1. Peningkatan kerjasama antar pemerintah kab/kota, provinsi, nasional, IMT-GT, Sosek Malindo, DMDI;	Setda Bappeda Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Disperindag
		2. Melaksanakan penataan ruang provinsi dan koordinasi penataan ruang antar kab/kota;	2. Implementasi tata ruang dan pendataan penyediaan informasi spasial Riau yang handal untuk pemangku kepentingan pembangunan;	Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Dinas KI-PDE Dinas Kehutanan
		3. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang;	3. Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;	Bappeda Setda Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
		4. Mengembangkan infrastruktur skala provinsi	4. Pembangunan jalan dan jembatan;	Dinas PU
		5. Meningkatkan upaya pemeliharaan sarana dan prasarana PU	5.1. Rehabilitasi/ pemeliharaan serta inspeksi jalan dan jembatan;	Dinas PU
			5.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebina-margaan	Dinas PU
		6. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi, pendayagunaan air, serta mengendalikan daya rusak air;	6.1. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air baku lainnya;	Dinas PU
			6.2. Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase	Dinas PU
			6.3. Pembangunan dan Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong	Dinas PU
			6.4. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai;	Dinas PU
			6.5. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Pengairan	Dinas PU
			6.6. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;	Badan Lingkungan Hidup
		7. Mengembangkan infrastruktur pedesaan dan daerah terpencil;	7. Pembangunan infrastruktur pedesaan dan daerah terpencil;	Dinas PU Badan PMPD
		8. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi perhubungan;	8. 1 Pembangunan prasarana dan sarana perhubungan;	Dinas Perhubungan
			8.2. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ,	Dinas PU Dinas Perhubungan

			8.3. Peningkatan pelayanan angkutan;	Dinas Perhubungan
			8.4 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas;	Dinas Perhubungan
			8.5. Peningkatan kelayakan kendaraan bermotor;	Dinas Perhubungan
		9. Meningkatkan ketersediaan perumahan, sarana dan prasarana dasar permukiman dan pertanahan;	9.1. Pengembangan pemukiman;	Dinas PU
			9.2 Lingkungan permukiman sehat;	Dinas PU
			9.3. Pemberdayaan komunitas permukiman;	Dinas PU
			9.4. Penataan sistem Pertanahan dengan penataan kepemilikan dan penyelesaian konflik	Setda
		10. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan wilayah perbatasan	10.1 Kerjasama pembangunan dengan daerah perbatasan;	Setda Bappeda
			10.2 Perencanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan daerah;	Bappeda Inspektorat
		11. Mengembangkan wilayah strategis, cepat tumbuh dan KEK;	11. Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan mempersiapkan infrastruktur penunjang	Bappeda Dinas PU
		12. Meningkatkan iklim dan realisasi investasi pembangunan	12. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
		13. Pemeratan pasokan, cakupan dan kualitas layanan infrastruktur energi dan kelistrikan.	13. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan energi;	Dinas Pertambangan dan Energi
4	Meningkatkan pembangunan perekonomian berbasis potensi sumberdaya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui perkuatan koperasi dan UKM sebagai kelanjutan pengentasan kemiskinan	1. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian	1.1. Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan
			1.2. Peningkatan produksi pertanian;	Dinas Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan
			1.3. Pemberdayaan sumber daya pertanian;	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan Badan Koordinasi Penyuluhan
			1.4. Penanggulangan hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan;	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Peternakan dan Kes Hewan Dinas Perkebunan Dinas Perikanan dan Kelautan

		<p>2. Membangun agribisnis yang mampu meningkatkan nilai tambah, dengan prioritas pada pembangunan industri hilir untuk pengolahan tanaman pangan dan perkebunan berbasis teknologi maju untuk tujuan konsumsi pangan, industri dan bahan energi Din(biofuel);</p>	<p>2.1 Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;</p> <p>2.2. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;</p>	<p>Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Kehutanan</p> <p>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p>
		3. Meningkatkan aneka usaha non kayu sekitar hutan;	3. Pemanfaatan potensi sumber daya kehutanan;	Dinas Kehutanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		4. Meningkatkan pengelolaan tanaman hutan industri;	4. Peningkatan ketahanan pangan (ketersediaan, akses, dan keamanan pangan);	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		5. Meningkatkan ketahanan pangan;	5. Peningkatan ketahanan pangan (ketersediaan, akses, dan keamanan pangan);	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan;	<p>6.1. Pengembangan budi daya perikanan; Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar</p> <p>6.2. Pengembangan perikanan tangkap;</p>	<p>Dinas Perikanan dan Kelautan</p> <p>Dinas Perikanan dan Kelautan</p>
		7. Meningkatkan kegiatan budi daya perikanan dan kelautan dan wawasan maritim masy. pesisir Riau;	7. Peningkatan kegiatan budi daya kelautan dan wawasan maritim masyarakat;	Dinas Perikanan dan Kelautan
		8. Memberdayakan masyarakat pesisir dalam hal perekonomian sumberdaya perikanan & kelautan;	8. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;	Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Kop & UKM Badan PMPD
		9. Memperkuat kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang pasar KUKM;	<p>9.1. Program perencanaan pembangunan ekonomi dengan sasaran meningkatkan promosi dan investasi;</p> <p>9.2. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</p> <p>9.3. Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah</p> <p>9.4. Pengembangan kewira-</p>	<p>Bappeda Badan Penanaman Modal dan Investasi Daerah</p> <p>Badan Penanaman Modal dan Investasi Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>Dinas PU Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi &amp; UKM</p> <p>Dinas Koperasi &amp;</p>

			usaha dan keunggulan kompetitif kop, usaha mikro, kecil & menengah;	UKM
			9.5. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;	Dinas Koperasi & UKM
			9.6. Pembinaan dan pengembangan BUMD dan lembaga keuangan non perbankan;	Dinas Koperasi & UKM
		10. Meningkatkan daya saing industri;	10.1 Pengembangan industri menengah dan besar;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi & UKM
			10.2. Pengembangan industri kecil dan menengah;	Dinas Koperasi & UKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			10.3. Penataan struktur dan peningkatan kemampuan teknologi industri;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		11 Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar dalam dan luar negeri;	11.1. Program peningkatan dan pengembangan ekspor;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			11.2. Pengembangan sistem perdagangan dalam negeri;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		12 Meningkatkan perlindungan konsumen;	12. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		13 Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata via pengembangan produk wisata yang unik, tradisional, dan mencerminkan jati diri masyarakat Riau	13.1 Pengembangan destinasi pariwisata;	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			13.2 Pengembangan pemasaran pariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Meningkatkan penanaman modal untuk mendukung pertumbuhan perekonomian	1. Mengembangkan wilayah strategis, cepat tumbuh, dan kawasan ekonomi khusus;	1. Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;	Bappeda Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
		2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menjadikan investasi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah	2. Peningkatan iklim investasi;	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
		3. Meningkatkan upaya promosi dan kerjasama investasi dalam rangka mempercepat pertumbuhan perekonomian	3. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
		4. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi melalui Perdagangan	4.1. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Ekspor Impor.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			4.2. Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Pedagang Kaki Lima dan Asongan.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

			4.3. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		5. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi melalui Perindustrian	5.1. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			5.2. Penataan Struktur Industri, termasuk Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			5.3. Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Meningkatkan peran masyarakat dan kelembagaan di perdesaan dalam pembangunan	1. Meningkatkan wawasan pembangunan masyarakat dan lembaga desa melalui pendidikan non formal (kursus dsb)	1. Pendidikan non formal;	Dinas Pendidikan Badan PMPD
		2. Memperkuat kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang pasar KUKM di pedesaan;	2.1. Pengembangan kewirausahaaan dan keunggulan kompetitif kop, usaha mikro, dan menengah;	Dinas Koperasi & UKM
		3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pedesaan dan melaksanakan sarjana masuk desa;	2.2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi kop, usaha mikro dan menengah;	Dinas Koperasi & UKM
		4. Mengembangkan lembaga ekonomi pedesaan;	3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan;	Badan PMPD Dinas Koperasi & UKM
		5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dlm membangun desa;	4. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;	Badan PMPD Dinas Kop & UKM
		6. Mewujudkan kemandirian desa.	5. Peningkatan partisipasi masyarakat membangun desa	Badan PMPD
		7. Meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi produktif.	6. Pemantapan pemerintahan dan pembangunan desa;	Biro Tata Pemerintahan Badan PMPD
7	Mewujudkan budaya Melayu menjadi payung kebudayaan daerah dan alat pemersatu berbagai budaya yang ada di Provinsi Riau	1. Menghidupkan sentra-sentra pendidikan kebudayaan Melayu melalui pendidikan formal dan Pendidikan non formal	1. Pendidikan formal dan non formal dg membentuk sentra Pendidikan Kebudayaan Melayu untuk mempersiapkan SDM (calon Guru Kebudayaan Melayu serta calon-calon konsul/kedutaan)	Dinas Pendidikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2. Meningkatkan kualitas dan muatan kurikulum pendidikan kemelayuan pada pendidikan dasar dan menengah	2. Pengembangan Kurikulum Budaya Melayu pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah	Dinas Pendidikan
		3. Meningkatkan khasanah kepustakaan	3. Pengembangan budaya baca dan pembinaan	Badan Perpustakaan, Arsip

		melayu dengan pengembangan budaya baca	perpustakaan;	dan Dokumentasi
		4. Memberdayakan masyarakat pedesaan yang berciri khas Melayu	4.1. Penyusunan buku adat dan Pengkajikan naskah melayu kuno yang tersebar di dalam dan luar negeri;  4.2. Peningkatan keberdayaan masyarakat Melayu pedesaan;	Balitbang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pendidikan  Badan PMPD
		5. Melaksanakan revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal melalui pengembangan nilai budaya	5. Pengembangan nilai-nilai budaya dengan menghimpun gagasan dan pemikiran-pemikiran cemerlang tentang budaya melayu guna mendinamisasikan nilai luhur budaya Melayu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Melayu;	Balitbang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		6. Mengembangkan pembangunan kebudayaan yang mampu berkontribusi terhadap peradaban dengan pengelolaan kekayaan budaya	6. Pengelolaan kekayaan budaya dengan sasaran meningkat penelitian kebudayaan dan Optimisasi pengakuan atas hak kekayaan Intelektual (HaKI) seni dan budaya melayu;	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		7. Mengelola keragaman budaya sebagai perekat dalam tata pergaulan sosial masyarakat;	7. Pengelolaan keragaman budaya dengan mewujudkan kerukunan dan rasa kebersamaan antar anggota, kelompok masyarakat dalam mewujudkan Provinsi Riau sebagai kawasan yang aman dan maju dalam kawasan Asia Tenggara, dan Internasional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Kesbang Polinmas
		8. Mengembangkan daerah tujuan wisata yang memiliki ciri khas Budaya Melayu sebagai bagian Budaya Nasional	8.1. Pengembangan Pemasaran  8.2. Pengembangan destinasi Pariwisata  8.3. Pengembangan Kemitraan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8	Meningkatkan kualitas lingkungan dan perlindungan lingkungan	1. Melaksanakan pemulihian dan konservasi sumberdaya air, udara, hutan, lahan, ekosistem pesisir dan laut dengan mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan  2. Meningkatkan kemampuan manajemen peningkatan kualitas lingkungan hidup	1.1. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan;  1.2. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan meningkatkan kesiagaan dan pencegahan.  2. 1 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;  2.2. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Badan Lingkungan Hidup  Badan Lingkungan Hidup  Badan Lingkungan Hidup  Badan Lingkungan Hidup

			2.3. Peningkatan Pengendalian Polusi	Badan Lingkungan Hidup
		3. Melaksanakan rehabilitasi, konservasi, dan perlindungan hutan dan lahan	3.1. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;	Badan Lingkungan Hidup
			3.2. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam,	Badan Lingkungan Hidup Badan Koordinasi Penyuluhan
			3.3. Rehabilitasi hutan dan lahan,	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan Dinas Perkebunan
			3.4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Badan Lingkungan Hidup
9	Meningkatkan kemampuan penanganan permasalahan regional dan global secara terpadu dan berkesinambungan	1. Meningkatkan koordinasi kerjasama wilayah perbatasan dan internasional;	1. Kerjasama pembangunan regional dan global secara terpadu dan berkesinambungan	Bappeda Setda
		2. Memantapkan penanganan lingkungan yang berdampak negatif dan mengantisipasi dampak lingkungan global	2. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;	Badan Lingkungan Hidup
		3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika dan mengantisipasi dampak negatif;	3. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi;	Balitbang Badan Kesbang Polinmas
		4. Meningkatkan jiwa nasionalisme di seluruh lapisan masyarakat;	4.1 Pengembangan wawasan kebangsaan; 4.2. Pendidikan politik masyarakat;	Badan Kesbang Polinmas Badan Kesbang Polinmas
		5. Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap penyakit-penyakit sosial (minuman keras, narkoba, perjudian, prostitusi), uang palsu, penyelundupan, dan eksploitasi anak di bawah umur;	5. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);	Badan Kesbang Polinmas Kantor Satpol PP

# **BAB VIII**

## BAB VIII

### INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS SERTA KEBUTUHAN PENDANAAN

#### A. Indikasi Rencana Program Prioritas

Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja pembangunan Provinsi Riau selama periode 2009 - 2013, ditetapkan Indikator pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan keberhasilan kinerja kepala daerah.

Pada bagian ini ditetapkan Indikator Rencana Program Prioritas yang merupakan target akhir yang akan dicapai dengan melaksanakan program prioritas berdasarkan bidang urusan dengan sejumlah sasaran dengan tujuan untuk mencapai Misi Pemerintah Provinsi Riau pada tahun terakhir (2013). Indikator rencana program prioritas tersebut dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8.1

Indikator Rencana Program Prioritas Pembangunan Provinsi Riau  
RPJMD Pada Tahun Terakhir 2013

No	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2013	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Pendidikan	1. Tertampungnya Anak Usia Sekolah di Lembaga Pendidikan Formal <ul style="list-style-type: none"><li>- APK SD/MI</li><li>- APK SMP/MTs</li><li>- APK SMA/SMK/MA</li></ul> 2. Meningkatnya Mutu Pendidikan Target Kelulusan <ul style="list-style-type: none"><li>- SD/MI</li><li>- SMP/MTs</li><li>- MA/SMK/MA</li></ul>	113,17 % 103,36 % 98,63 %  97,49 % 95,59 % 69,86 %  100 % 98,48 % 96,30 %	Dinas Pendidikan

		Rerata Nilai Ujian - UASBN SD - UN SMP - UN SMA - UN SMK	7,20 7,40 7,45 7,45	
		Rerata Lama Sekolah Melek Huruf Penduduk Usia 10 Tahun Tamat/Tidak Tamat SD/MI	8,57 Th 98,21 % 32,12 %	
		3. Relevansi Pendidikan Ratio SMA : SMK	50 : 50 %	
2. Kesehatan	1. Meningkatnya Usia Harapan Hidup	75,23 Th	Dinas Kesehatan Badan Pemberdayaan Perempuan, PA dan KB	
	2. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)/1.000 KLH	20,25%		
	3. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 KLH	226 Org		
	4. Menurunnya Angka Gizi Buruk Balita	2 %		
	5. Menurunnya Angka Gizi Kurang Balita	10 %		
	6. Menurunnya Angka Gizi Lebih Balita	1.2 %		
3. Perpustakaan	1. Meningkatnya jumlah Pengunjung Pustaka Provinsi	894.293 Org/Th	Badan Perpustakaan Daerah	
	2. Meningkatnya kualitas layanan Mobil Pustaka Keliling	325 Desa		
4. Ketenagakerjaan	1. Menurunnya Jumlah Pengangguran Tidak Kentara	6,18 %	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Dinas Koperasi dan UKM Badan PMPD	
	2. Menurunnya Jumlah Pengangguran Terbuka	6,07 %		
	3. Tumbuhnya Angkatan Kerja	3,69 %		
	4. Tumbuhnya Kesempatan Kerja	4,89 %		
	5. Tertatanya Penempatan Transmigrasi Penduduk Tempatan	658 KK		
5. Kepemudaan & Olahraga	1. Terbinanya Organisasi Pemuda	17 Organisasi	Dinas Pemuda dan Olahraga	

2	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dalam Mengentaskan Kemiskinan	1. Koperasi & UKM	Tumbuhnya Usaha Baru Individu untuk mengatasi kemiskinan 10,63% (Unit/ Individu)	1.250 Unit	Dinas Koperasi dan UKM Badan PMPD
		2. Pemberdayaan Masyarakat	1. Meningkatnya Bantuan Pemberdayaan Desa - UED-SP untuk mengurangi angka kemiskinan 10,63%	972 Desa	
			2. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) SP untuk mengurangi angka kemiskinan 10,63% -	392 Unit	
		3. Sosial	1. Tersalurnya Bantuan/ Subsidi Beras Kepada Masyarakat Miskin	293.707 KK	Dinas Sosial Biro Kesra Dinas Sosial Biro Kesra
			2. Bantuan Pembinaan Penduduk Fakir Miskin dan KAT	750 Ogr	
			3. Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Keluarga Miskin ke Per-guru Tinggi	15.000 Org	Biro Kesra
		4. Pertanian	1. Peremajaan Kebun Karet Tua Rakyat	25.000 Ha	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	Pembangunan & Peningkatan Kualitas Infrastruktur	1. Pekerjaan Umum	1. Meningkatnya Kualitas Jalan - Nasional (81,8% / Km) - Provinsi (37,2% / Km)	920,96 Km 1,128,95 Km	Dinas Pekerjaan Umum
			2. Bertambahnya Luas DI	12.556 Ha	
			3. Bertambahnya Luas DR	132.499 Ha	
			4. Terwujudnya Konservasi SDA	25 Paket	
			5. Terwujudnya Pembangunan Pengamanan Erosi Pantai	69.800 M'	
			6. Terwujudnya Pembangunan Pengamanan Abrasi Pantai	66.000 M'	
			7. Tersediaan Air Minum	3.347 L/Dt	
			8. Terealisasinya Pembangunan Perumahan Swadaya	10.750 Unit	
		2. Perhubungan	1. Terwujudnya Dermaga penyeberangan Ro-Ro 9 Paket	100 %	Dinas Perhubungan
			2. Tersedianya Sarana telekomunikasi 3 Paket	100 %	

			3. Rehabilitasi/ Terpemeliharanya sarana dan fasilitas Perhubungan 5 Paket	100 %	
		3. Energi	1. Terpasangnya Daya mampu Pembangkit listrik 2. Terwujudnya Ratio Elektrifikasi 3. Terealisasinya Pembangunan PLTU Peranap Tahap I	650 MW 85 % 50 %	Dinas Pertambangan dan Energi
4	Revitalisasi Pertanian	1. Ketahanan Pangan	1. Meningkatnya Produksi Gabah Kering Giling 2. Meningkatnya Produktivitas Gabah Kering Giling 3. Meningkatnya Produksi Buah-buahan 4. Meningkatnya Produksi Sawit 5. Meningkatnya Produksi Daging Sapi (Kg/Tahun)	881.707 Ton/Th 4.4 Ton/Ha 195.628 Ton/Ha 8.326.599,33 Ton / Ha 8.751.324 Kg/Th	Badan Ketahanan Pangan dan Hortikultura
		2. Pertanian	1. Meningkatnya Pembangunan Kebun K2I 2. Terwujudnya Revitalisasi Kebun Karet Tua menjadi Kebun Kakao (Ha) 3. Peremajaan dan Pemeliharaan Kebun Karet 4. Peremajaan Kebun Karet Tua menjadi Kebun Sawit 5. Peremajaan dan Pemeliharaan Kelapa	10.200 Ha 10.000 Ha    	Dinas Perkebunan
		3. Kelautan dan Perikanan	1. Meningkatnya Produksi Perikanan	180.000 Ton/Th	
5	Pelaksanaan PON XVIII	1. Kepemudaan dan Olahraga	- Terbinanya Atlit untuk Menyukceskan PON XVIII di Provinsi Riau	Atlit Semua Cabang Olahraga yang dipetandingkn	Dinas Pemuda dan Olahraga
		2. Pekerjaan Umum	Terbangunnya Venus-Venus Penunjang sebelum Penyelegaraan PON XVIII Tahun 2012	100 %	Dinas Pemuda dan Olahraga
6	Pengelolaan Tata Pemerintahan yang Baik	1. Otonomi Daerah & Pemerintahan Umum	1. Tertatanya Rekomendasi Kebijakan Pemprov secara Efektif	98 %	Biro Tata Pemerintahan BKD,

			2. Meningkatnya Kualitas Kinerja SKPD	44 SKPD	Inspektorat
		2. Komunikasi dan Informasi	Terkomunikasinya Kebijakan Pemprov Riau dan Aplikasi hasil riset kepada Stakeholders	Pemakaian Teknologi	Balitbang Badan KI-PDE Biro Humas
7	Mewujudkan Kebudayaan Melayu sebagai Akar dan Payung Negeri	1. Kebudayaan	<p>1. Terlestarinya Budaya Melayu dalam meningkatkan kerukunan antar suku, adat dan budaya yang ada di Provinsi Riau dan Aplikasi Nilai-Nilai Luhur Kebudayaan Melayu dalam Kehidupan Bermasyarakat melalui temu Rapat koordinasi oleh LAM Riau 12 paket setiap tahun</p> <p>2. Penggalian dan Pengkajian Dokumen Budaya Melayu Asli yang hilang 2 Paket</p> <p>3. Terbangunnya sentra / Pusat Bahasa dan Dokumen Melayu, serta Pusat Pendidikan Budaya Melayu 2 Paket yang menjadi rujukan bangsa Indonesia dan Melayu serumpun</p> <p>4. Terbentuknya Legitimasi Kelembagaan Adat Pedesaan</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>149 Perdes</p>	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata     Badan PMPD
		2. Pendidikan	Aplikasi Kurikulum Budaya Melayu yang Efektif di Lembaga Pendidikan Formal (SD – SLTA)	Tersedianya Buku Pelajaran Bdy Melayu 1 Anak 1 Buku	Dinas Pendidikan Dinas Budpar
8	Pembangunan Pariwisata	1. Kebudayaan	<p>1. Tertatanya Objek Wisata Unggulan tiap Kab/ Kota</p> <p>2. Terselenggaranya Event Wisata Budaya Tradisional Daerah Bertaraf Nasional dan Internasional</p>	<p>1 – 3 Objek Wisata</p> <p>Minimal 1 (Satu) Event tiap Kab/Kota</p>	Dinas Budpar
		2. Pekerjaan Umum	<p>1. Meningkatnya Kualitas Jalan Menuju Objek Wisata</p> <p>2. Meningkatnya Kualitas Fisik Penunjang Objek / Event Wisata</p>	Terjalannya Koordinasi Pemprov dengan PemKab/Kota se Prov. Riau	Dinas PU Dinas Budpar

9	Pembangunan Pedesaan menuju Kemandirian	1. Otonomi Daerah & Pemerintahan Umum	1. Peningkatan Kemampuan Propesional Lurah/ Kepala Desa	1.592 Org	Biro Tata Pemerintahan Badan PMPD
			2. Meningkatnya Kemampuan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa Mandiri	540 Org	
		2. Pendidikan	Meningkatnya jumlah tenaga kerja terlatih dari tenaga kerja penganguran melalui Pelatihan Life Skill Pendidikan Non Formal - BPKB	470 Org	Dinas Pendidikan
		3. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1. Meningkatnya Jumlah Koperasi Unggulan yang tangguh untuk dijadikan tonggak penyangga ekonomi pedesaan	1.500 Unit	Dinas Koperasi dan UKM
			2. Meningkatnya Permodalan Koperasi Unit Desa	1.592 KUD	
		4. Pemberdayaan Masyarakat	1. Tertatanya Peraturan Desa	149 Desa	Badan PMPD
			2. Meningkatnya BUMD Desa	392 BUMD	
			3. Meningkatnya Posyantekdes	151 Desa	
			4. Terwujudnya desa mandiri secara bertahap	149 Desa	
			5. Terlaksananya secara Efektif Fungsi Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan	350 Org	
		5. Pekerjaan Umum	1. Terbangun Rumah Sederhana Layak Huni	10.100 Unit	Dinas PU
			2. Pemeliharaan Jalan Desa	1.500 Desa	
			3. Penyediaan Prasarana Air Bersih Pedesaan	500 Desa	
		6. Energi dan Sumber Mineral	Terpasangnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pedesaan	7.000 Unit	Dinas Pertambangan dan Energi
10	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	1. Lingkungan Hidup	1. Menurunkan titik Hotspot Kebakaran hutan dan lahan Provinsi Riau dari 50% Tahun 2006)	25 %	Badan Lingkungan Hidup
			2. Terkendalinya Limbah Cair, B3 Industri, Emisi Udara yang disebabkan dari Industri.	200 Unit	

## B. Kebutuhan Dana Pembangunan Tahun 2009 - 2013

Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk kebutuhan masyarakat. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Dasar Pelaksanaan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan pentingnya perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ditetapkan perlunya sejumlah pembiayaan yang berasal dari penerimaan daerah. Kebutuhan dana pembangunan dan kegiatan penunjang lainnya Tahun 2009-2013 akan dialokasikan untuk pengeluaran langsung dan pengeluaran tidak langsung yang dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 8.2

Rencana Kebutuhan Dana Pembangunan Provinsi Riau (Miliar Rupiah)  
Tahun Anggaran 2009 – 2013

No	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	Ket
1.	Pengeluaran Tidak Langsung	1.661,01	1.683,50	1.793,11	1.871,91	1.978,18	
2.	Pengeluaran Langsung	2.345,10	2.492,90	2.656,30	2.734,55	2.738,15	

Untuk perincian pengeluaran langsung yang didistribusikan menurut fungsi Pemerintah Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dituangkan pada tabel 8.3 halaman berikut.

## C. Rencana Kerangka Regulasi

Untuk efisiensi, efektifitas, sinkronisasi dan harmonisasi dalam pencapaian visi dan pembangunan Provinsi Riau pada tahun 2014, sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk menwujudkan visi Riau 2020 yang dijabarkan ke dalam bentuk arah kebijakan, program dan sasaran pembangunan, maka perlu disusun Rencana Kerangka Regulasi yang berisi tentang regulasi/pengaturan peraturan daerah dan atau peraturan gubernur terhadap pelaksanaan program dalam bentuk payung hukum, payung kebijakan dan penanggungjawab yang jelas.

Pendanaan untuk berbagai program pembangunan dapat dilakukan dengan sistem tahun tunggal (*single year*) dan dengan sistem tahun jamak (*multi years*). Penentuan program dengan menggunakan kedua sistem tersebut melihat dari cakupan, kualitas dan kuantitas program yang akan dilaksanakan.

Tabel 8.3  
Rencana Kerja Kerangka Pendanaan (Miliar Rupiah)  
Tahun Anggaran 2009-2013

URUSAN PEMERINTAH	2009	2010	2011	2012	2013
<b>URUSAN WAJIB</b>	<b>2.170,97</b>	<b>2.248,30</b>	<b>2.358,50</b>	<b>2.359,05</b>	<b>2.321,95</b>
1. Pendidikan	426,62	430,00	440,00	460,00	480,00
2. Kesehatan	158,50	159,00	161,00	163,00	180,00
3. Pekerjaan Umum	654,10	650,00	650,00	600,00	800,00
4. Perencanaan Daerah	17,52	18,00	18,50	18,65	18,70
5. Perhubungan	38,70	38,00	39,00	40,00	41,00
6. Lingkungan Hidup	7,02	7,50	8,60	8,80	9,00
7. Pemberdayaan Perempuan	5,62	6,00	7,00	7,50	8,00
8. Sosial	15,14	15,00	15,50	16,00	16,50
9. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	25,61	25,70	26,00	27,00	30,50
10. Koperasi dan UKM	7,90	8,10	9,00	9,50	10,00
11. Penanaman Modal dan Promosi Daerah	15,49	15,50	15,60	15,60	15,75
12. Kebudayaan, Seni dan Pariwisata	44,80	50,40	55,50	70,00	82,00
13. Kepemudaan dan Olah Raga	367,14	425,00	500,00	500,00	75,00
14. Kesatuan Bangsa dan Politik Luar Negeri	15,16	15,20	15,30	15,50	17,00

15. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	325.71	330.00	340.00	345.00	350.00
16. Ketahanan Pangan	6.69	7.00	8.00	9.50	10.00
17. Pemberdayaan Masyarakat	32.27	40.00	42.00	45.00	70.00
18. Komunikasi, Informasi dan PDE	6.98	7.10	7.50	8.00	8.50
<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>174.13</b>	<b>244.60</b>	<b>297.80</b>	<b>375.50</b>	<b>516.20</b>
1. Pertanian	105.18	175.00	225.00	300.00	425.00
2. Kehutanan	8.73	9.00	10.00	10.50	10.60
3. Pertambangan dan Energi	12.87	13.00	14.50	15.00	18.00
4. Perikanan dan Kelautan	37.58	37.60	37.80	39.00	50.00
5. Perindustrian dan Perdagangan	9.77	10.00	10.50	11.00	12.60
<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.345,10</b>	<b>2.492,90</b>	<b>2.656,30</b>	<b>2.734,55</b>	<b>2.738,15</b>

Sumber: Data Olahan

# **BAB IX**

# **BAB IX**

---

## BAB IX

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Keberhasilan pembangunan Provinsi Riau dalam 5 (lima) tahun ke depan (2009-2013) ditentukan dari capaian target indikator kinerja secara makro sebagaimana dituangkan dalam tabel 9.1 s/d 9.6. Target-target tersebut akan diaplikasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan kabupaten/kota melalui pelaksanaan program-program pembangunan secara efektif dan efisien. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Riau ini, indikator kinerja daerah hanya diukur pada tahun terakhir kepemimpinan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau yaitu tahun 2013. Sedangkan untuk target kinerja tahunan (2009-2012, termasuk tahun transisi 2014) akan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Sebagai payung program untuk mencapai target Indikator kinerja SKPD tersebut telah dituangkan dalam tabel 9.7. Secara rinci tabel tersebut memuat Misi Pembangunan Provinsi Riau, Arah Kebijakan, Program kerja, Indikator keberhasilan tahun 2013 serta SKPD penanggung jawab. Target keberhasilan tersebut akan diukur dari sejauhmana capaian pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan dalam suatu tolok ukur dari tingkat efektivitas program yang memberdayakan aparatur profesional dan dengan tingkat efisiensi target waktu serta penggunaan dana (APBD) yang sesuai rencana.

Di samping target tersebut di atas, keberhasilan yang dicapai akan dilihat dari aplikasi konsep dasar untuk menjawab kebutuhan pokok seperti target-target untuk mempercepat pembangunan Provinsi Riau sebagai wilayah pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia barat, baik melalui pembangunan pusat-pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah maupun pusat kegiatan lokal dengan membangun sejumlah sarana dan prasarana penunjang seperti jalan, jembatan, sarana transportasi, telekomunikasi, listrik dan air bersih serta

memberikan fasilitas kemudahan perizinan usaha sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Proyeksi data capaian lima tahun ke depan (2009-2013) sebagai indikator yang akan dicapai dalam pembangunan Provinsi Riau, memuat bidang-bidang prioritas antara lain:

Tabel 9.1

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2009-2013  
dan Tahun 2014 (Masa Transisi)

NO	TAHUN	DENGAN MIGAS (%)	TANPA MIGAS (%)
1	2009	5,76	7,95
2	2010	6,13	8,25
3	2011	6,67	8,55
4	2012	7,27	8,90
5	2013	7,91	9,26
6	2014	8,62	9,82

Sumber : BPS Provinsi Riau 2009.

Proyeksi data kemiskinan di Provinsi Riau yang akan dicapai melalui penurunan setiap tahun dengan mengaplikasikan program-program pembangunan lima tahun ke depan dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 9.2

Proyeksi Tingkat Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2009-2013  
dan Tahun 2014 (Masa Transisi)

NO	TAHUN	KEMISKINAN (%)
1	2009	9,68
2	2010	9,19
3	2011	8,58
4	2012	8,02
5	2013	7,49
6	2014	6,99

Sumber: Data Olahan Bappeda Riau 2009.

---

Sedangkan proyeksi data pengangguran terbuka di Provinsi Riau yang akan dikejar melalui program-program pembangunan lima tahun ke depan sebagai berikut:

**Tabel 9.3**  
**Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Riau Tahun 2009-2013  
dan Tahun 2014 (Masa Transisi)**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>PENGANGGURAN TERBUKA (%)</b>
1	2009	8,69
2	2010	7,70
3	2011	7,03
4	2012	6,63
5	2013	6,13
6	2014	6,07

*Sumber: Data Olahan Bappeda Riau 2009.*

Proyeksi Rata-rata lama sekolah di Provinsi Riau sebagai bagian dari tolok ukur Indeks Pembangunan Manusia yang akan menjadi target keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan (2009-2013, termasuk masa transisi 2014) adalah sebagai berikut:

**Tabel 9.4**  
**Proyeksi Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Riau Tahun 2009-2013  
dan Tahun 2014 (Masa Transisi)**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>LAMA SEKOLAH (Tahun)</b>
1	2009	8,9
2	2010	9,1
3	2011	9,2
4	2012	9,3
5	2013	9,5
6	2014	9,6

*Sumber: Data Olahan Bappeda Riau 2009.*

---

Berikutnya akan diproyeksikan target Angka Kematian Bayi di Provinsi Riau yang akan menjadi target keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan (2009-2013, termasuk masa transisi 2014) seperti dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9.5

Proyeksi Angka Kematian Bayi di Provinsi Riau Tahun 2009-2013  
dan Tahun 2014 (Masa Transisi)

NO	TAHUN	KEMATIAN BAYI (%)
1	2009	20,96
2	2010	20,72
3	2011	20,46
4	2012	20,29
5	2013	20,25
6	2014	20,12

Sumber: Data Olahan Bappeda Riau 2009.

Pada bagian ini akan dipaparkan juga proyeksi Angka Harapan Hidup di Provinsi Riau yang akan menjadi target keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan (2009-2013, termasuk masa transisi 2014) sebagai berikut:

Tabel 9.6

Proyeksi Angka Harapan Hidup di Provinsi Riau Tahun 2009-2013  
dan Tahun 2014 (Masa Transisi)

NO	TAHUN	USIA (%)
1	2009	72,78
2	2010	73,33
3	2011	73,96
4	2012	74,59
5	2013	75,23
6	2014	75,86

Sumber: Data Olahan Bappeda Riau 2009.

**Tabel 9.7**  
**Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Riau**  
**Tahun 2009-2013**

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	IDIKATOR KEBERHASILAN 2013	SKPD PELAKSANA
1	Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Bermoral melalui Keteladanan Pemimpin dan Aparat	1. Menata dan sinkronissasi peraturan perundang-undangan 2. Meningkatkan kualitas kompetensi aparatur pemerintahan	1. Penataan peraturan perundang-undangan, dengan Target Sasaran tertatanya peraturan perundang-undangan secara baik di Provinsi Riau: - Perda yang ditinjau ulang dari Perda yg ada - Perda yang dianggap valid 2. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dengan target sasaran meningkatnya kualitas kompetensi aparatur daerah: - Peningkatan Kualifikasi S1, S2 dan S3 - Pendidikan Keahlian (Skills)	116 Perda 2 Perda	Setda



	mendapatkan data dan informasi pembangunan oleh stakeholder pembangunan		
8.2.	Optimalisasi kerjasama pembangunan dengan sasaran mewujudkan kejamasama dan koordinasi pembangunan antar pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat	(25 paket)	Bappeda, Seida, Badan Penghubung
8.3.	Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah dengan sasaran meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	100 %	Bappeda
9.	Memperbaiki sistem administrasi kearsipan	9. Perbaikan penataan sistem administrasi kearsipan	Revisi Perda kebutuhan arsip, Tertatinya Koleksi Buku, dan mudahnya Akses Informasi dan IT.
10.	Menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip daerah	10. Penyelamatkan dan pelestarian dokumen/arsip daerah dengan sasaran meningkatkan kelestarian dokumen/arsip daerah	60 dokumen/arsip
11.	Meningkatkan kerjasama dengan media massa dalam menyebarkan informasi pembangunan	11. Peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan informasi kearsipan	60 paket
12.	Mengembangkan wahana komunikasi, informasi, dan media massa;	12. Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa dengan sasaran mengembangkan komunikasi, informasi via media massa secara berkelanjutan	(240 paket)
13.	Mengkaji dan meneliti bidang informasi dan komunikasi;	13.1. Peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi	500 Org
		13.2. Pengkajian dan penelitian informasi dan komunikasi dengan sasaran: - Penelitian bidang informasi dan komunikasi yang dipublikasikan dan menjadi input Kebijakan Pembangunan	Seida, Dinas KI-PDE Balitbang, Seida, Dinas KI-PDE 100 % (25 hasil)

2	<b>Mewujudkan SDM Berkualitas sebagai Kelanjutan Pengembangan Kebodohan</b>	1. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan;	<p>1.1. Pendidikan anak usia dini dengan sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Target APK bagi pendidikan anak usia dini (PAUD)</li> </ul> <p>1.2. Wajib belajar pendidikan dasar (peningkatan daya lampung, kebebasan bagi anak tidak mampu dan melaksanakan pendidikan anak marginal) dengan meningkatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- APK SD/MI</li> <li>- APK SMP/MTs</li> <li>- APK SMA/MA/SMK</li> </ul>	97,8 %	Dinas Pendidikan
		2. Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;	<p>2.1. Peningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Kompetensi Guru sebanyak 6.864 orang dari 14.159 orang yang sudah ditingkatkan selama ini, sehingga keseluruhannya menjadi 23.384 orang</li> <li>- Meningkatkan jumlah guru yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai standar (S1) <ul style="list-style-type: none"> <li>* Guru SD/MI</li> </ul> </li> <li>* Guru SMP/MTs</li> <li>* Guru SMA/SMK/MA</li> </ul> <p>- Kesejahteraan Guru sebanyak 38.007 PNS dan 5.583 Non PNS (pertahun)</p>	<p>24,36 % (6.864 org)</p> <p>23,36% (Bertambah 5,06% dari kondisi saat ini 18,30%)</p> <p>64,50% (Bertambah 7,49% dari kondisi saat ini 57,01%)</p> <p>82,49% (Bertambah 9,58% dari kondisi saat ini 72,91%)</p> <p>Rp. 1.200.000/ Org</p>	Dinas Pendidikan

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebutuhan guru</li> <li>- Jumlah Rintisan SSN SD/SMP/SLTA yang menggunakan ICT</li> <li>- Jumlah Rintisan SBI SD/SMP/SLTA yang menggunakan ICT</li> </ul>	2.017 Org 425 Sekolah 72 Sekolah	
2.2.	Bantuan Beasiswa bagi siswa berprestasi dan Tidak Mampu Ekonomi dalam Pendidikan Tinggi	1.250 Org	Dinas Pendidikan
2.3.	Pendidikan non formal, dengan sasaran:		Dinas Pendidikan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurangi angka buta aksara,</li> <li>- Meningkatkan partisipasi Paket A, B dan C</li> <li>- Meningkatkan kualitas PKBM dan lembaga kursus;</li> </ul>	98.01% 6.670 Org 124 Lbg	Dinas Pendidikan
2.4.	Peningkatan kualitas pelayanan Manajemen Berbasis Sekolah (otonomi sekolah) sebanyak 20 Paket	500 SD/MI 225 SMP/MTs 150 SMAMA 20 SMK	Dinas Pendidikan
2.5.	Peningkatan Kreativitas dan Bantuan Fasilitas Pendidikan Luar Biasa	Semua SDLB Negeri/Swasta	Dinas Pendidikan
2.6.	Peningkatan Profesional Tenaga Pendidik Guru/Tenaga Kependidikan		Dinas Pendidikan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK/Sederajat</li> <li>- Pelatihan Kompetensi Guru Mata Pelajaran/Guru Bidang Studi</li> <li>- Pelatihan dan Musyawarah Guru</li> </ul>	1.260 Org 3.450 KK/GMGP 7.500 Org	Dinas Pendidikan
2.7.	Peningkatan Kualitas SDM Berbasis IMTAQ		Dinas Pendidikan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan Pengembangan TPA (Daarul Al Qur'an)</li> <li>- Dukungan Pembangunan Islamic Center</li> <li>- Dukungan Bagi LPTQ di Provinsi Riau</li> </ul>	12 TPA di Ibukota Kab/Kota SIAK, INHIL, KAMPAR, 12 Kab/Kota	Setda Dinas PU

		2.8. Peningkatan Kualitas Penguruan Tinggi - Dukungan Fasilitas terhadap Penguruan Tinggi di Provinsi Riau	2 PTN (UR, UIN SUSQ) PTS (UJR, UNILAK, UNISI, UMRI, dll)	Dinas Pendidikan Setda Dinas PU
3.	Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat;	3. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dengan: - Meningkatkan kelembagaan perpustakaan desa / kelurahan - Meningkatkan kualitas tenaga perpustakaan, koleksi bacaan - Jumlah Pengunjung pertahun	790 Unit 790 Org 15.800 Org	Dinas Pendidikan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi;	4. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan umum kab/kota dan meningkatkan layanan perpustakaan keliling berbasis teknologi informasi dan komputer	12 Paket	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
5.	Mendorong tercapainya Indonesia sehat melalui peningkatan kualitas kesehatan lingkungan serta pengawasan peredaran makanan dan obat di Provinsi Riau;	5. Pengembangan lingkungan sehat, dengan meningkatnya kualitas dan jumlah lingkungan sehat, menurunnya jumlah penderita penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan yang tidak sehat. - Tempat Penjualan Makanan yg memenuhi syarat - Tempat Tempat Umum yg memenuhi syarat - Rumah Tangga Sehat - Institusi yang dibina	80 % 80 % 65 % 70 %	Dinas Kesehatan RSUD RS Jiwa
6.	Meningkatkan pembangunan bidang kesehatan di desa-desa, baik obat-obatan, tenaga medis serta sarana dan prasarana lainnya;	6. Program upaya kesehatan masyarakat dengan meningkatkan komitmen dan kemampuan kab/kota untuk mencapai desa siaga dan perilaku hidup bersih dan sehat: - Desa Siaga - PHBS	80 % 65 %	Dinas Kesehatan

	<p><b>7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan harga yang sesuai dg kemampuan masyarakat di RSUD;</b></p>	<p><b>7.1. Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Komitmen Kabupaten/Kota melalui Desa Siaga dan Pelaku Hidup Bersih dan Sehat</b></p>	1.592 Desa	Dinas Kesehatan Badan PMRD
	<p><b>7.2. Program manajemen pelayanan kesehatan dg menyediakan pembiayaan kesehatan di prov dan kab/kota dalam jumlah mencukupi untuk memenuhi standar mutu (% APBD)</b></p>		15 %	Dinas Kesehatan RSUD, RS Jiwa
	<p><b>7.3. Program sumber daya kesehatan dengan meningkatkan jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan yang sesuai dengan standar, meningkatkan pelayagunaan aparatut kesehatan, meningkatkan kualitas tenaga kesehatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ratio dokter terhadap 100.000 penduduk</li> <li>- Ratio dokter gigi terhadap 100.000 penduduk</li> <li>- Ratio dokter spesialis trndap 100.000 penduduk</li> <li>- Ratio bidan terhadap 100.000 penduduk</li> <li>- Ratio perawat terhadap 100.000 penduduk</li> <li>- Ratio apoteker terhadap 100.000 penduduk</li> </ul>		Dinas Kesehatan RSUD	
	<p><b>7.4. Pengawasan obat dan makanan di laboratorium</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan obat konsumsi sesuai kebutuhan</li> <li>- Pengadaan obat generik</li> <li>- Pengadaan obat essensial</li> </ul>		90 %	Dinas Kesehatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	<p><b>7.5. Program upaya kesehatan masyarakat, dengan meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas di daerah pedesaan;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cakupan rawat jalan</li> </ul>		100 %	Dinas Kesehatan
	<p><b>7.6. Pengadaan dan pening-katan sarana prasarana rumah sakit dengan meningkatkan kapasitas tempat tidur RSUD sebagai pusat rujukan rawat inap untuk Provinsi Riau;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ratio paramedis perawatan TT RS type A dan B</li> </ul>	2:(3-4)	RSUD	

		- Ratio paramedis perawatan thd TTRS type C	1 : 1	
8. Memperbaiki gizi masyarakat dan memberantas penyakit menular	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan gizi masyarakat dengan menununkan jumlah penderta gizi buruk dan membenarkan kesadaran untuk memakan makanan yang bergizi, sehat dan bersih; Gizi kurang balita</li> <li>- Pencegahan &amp; penanggulangan penyakit menular dengan mengoptimalkan fungsi rumah sakit/puskesmas dan meningkatkan upaya penanggulangan penyakit secara cepat;</li> <li>- Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yg dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) &lt;24 jam</li> <li>- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit</li> <li>- Penderita Malaria yang diobati</li> <li>- Balita dengan diare yang ditangani</li> <li>- Balita dengan Pneumonia yang ditangani</li> <li>- Penderita DBD yang ditangani</li> <li>- Desa / kelurahan UCI</li> <li>- Infeksi Menular Seksual yang dibatasi</li> </ul>	10 %	Dinas Kesehatan	
				Dinas Kesehatan
9. Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Bayi serta meningkatkan kesehatan anak balita;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, terutama dari keluarga kurang mampu; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angka Kematian Ibu (Orang KLH)</li> <li>- Angka Kematian Bayi (Orang KLH)</li> </ul> </li> <li>- Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dengan menurunkan jumlah kematian anak, meningkatkan persentase pelayanan kesehatan anak balita, serta menurunkan kasus kesehatan dan gizi anak balita; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balita yang naik berat badannya</li> <li>- Balita yang mendapat kapsul Vit A 2x/tahun</li> <li>- Balita bawah garis merah</li> <li>- Desa/kelurahan mengalami KLB Gizi buruk yang ditangani,24 jam</li> <li>- Kecamatan bebas rawan gizi</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 226/100.000 Org</li> <li>- 261.000 Org</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- Badan Pemberdayaan Perempuan, PA dan KB</li> </ul>	
				Dinas Kesehatan.

	9.3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dengan membangun Pusat-Pusat Layanan Panti Asuhan di Kab/Kota	Pembangunan dilakukan melalui Sharing Budget Prov, Kab/Kota	100 %
10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin;	10. Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin dg menjamin tiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar & atau rujukan/spesialisistik bermutu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cakupan pelayanan kesehatan dasar maskin</li> <li>- Cakupan pelayanan rujukan maskin</li> </ul>	100 % 100 %	Dinas Kesehatan Badan PMPD
11. Membantu mewujudkan academic hospital di Universitas Riau sebagai pusat rujukan;	11.1. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, dengan sasaran peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan;  11.2. Pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, dengan sasaran meningkatnya pelayanan rawat inap dan rawat jalan dapat ditangani	Tipe RS = Tipe A Pendidikan Terpenuhinya dokter spesialis jiwa 7 orang dan dokter sub spesialis 3 orang  100 %	Dinas Kesehatan RS Jiwa  Dinas Kesehatan RSUD RS Jiwa
12. Meningkatkan upaya pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) secara terpadu dan terkoordinasi;	12. Penataan administrasi kependudukan, dengan sasaran terlaksana SIAK terpadu dan terkoordinasi di seluruh Kab/Kota dan tersedianya data kependudukan yang akurat, valid dan mutakhir	2 unit 4 paket 14 unit	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
13. Meningkatkan upaya penataan dan pengendalian mobilitas penduduk;	13.1 Penataan dan Pengendalian mobilitas penduduk, dengan sasaran pemerataan penduduk sesuai dengan daya dukung lahan dan ketersediaan infrastruktur (Kab/Kota)	11 Kab/Kota 59 paket	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
	13.2 Pengembangan Wilayah Transmigrasi, Lokal dan Regional dengan sasaran Transmigasi Tempatan bagi daerah rawan banjir dan bencana lainnya	DAS 2 lokasi Rawan Bencana 1 lokasi	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan

	<b>14. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;</b>	<b>14. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan standarisasi dan sertifikasi; pemagangan, dan pembinaan lembaga pelatihan tenaga kerja swasta dan pemerintah</b>	5.945 Org	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
	<b>15. Meningkatkan kesempatan kerja;</b>	<b>15. Peningkatan kesempatan kerja yang difasilitasi oleh instansi pemerintah dan swasta untuk membuka peluang kerja padat karya</b>	3.040 Org	Dinas Tenaga Kerja Transkep Dinas Kop & UKM
	<b>16. Meningkatkan pelaksanaan peraturan daerah tentang penempatan tenaga kerja lokal</b>	<b>16. Peningkatan kesempatan kerja dengan sesuai dengan peraturan daerah dan terfasilitsasinya penempatan tenaga kerja lokal di perusahaan swasta sesuai dengan peraturan daerah</b>	300 Org	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
	<b>17. Mendorong dan memfasilitasi angkatan kerja agar menjadi wirausahawan tangguh;</b>	<b>17. Peningkatan kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja wirausahawan</b>	3.000 Org	Dinas Tenaga Kerja Transkep Dinas Kop & UKM Badan PMPD Disperindag
	<b>18. Memperkuat lembaga ketenagakerjaan</b>	<b>18. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan melalui penyelesaian hubungan industrial; Sistem pengupahan; Pembangunan sarana hubungan industrial dan Memfasilitasi perlindungan tenaga kerja terhadap naskah kontrak kerja</b>	50 Kasus	Dinas Tenaga Kerja Transkep Dinas Perindag
	<b>19. Melanjutkan upaya pengentasan kemiskinan;</b>	<b>19. Pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin, komunitas adat terpencil, penyandang masalah untuk menurunkan angka kemiskinan (Orang)</b>	2.114 Org	Dinas Sosial Setda
	<b>20. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);</b>	<b>20.1 Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan meningkatkan upaya antisipasi terhadap dampak negatif dari pemutangan TKI dari Malaysia melalui Provinsi Riau, Menjamin pelayanan/ perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksplorasi perempuan</b>	100 % (10 Paket)	Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Transkep Setda Badan PP,PA & KB
		<b>20.2 Pembinaan anak terlantar dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan Anak terlantar</b>	100 % (15 Paket)	Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja

	dan Anak natal	Transkep Badan PP,PA & KB
	350 Org	Dinas Sosial <b>Dinas Koperasi dan UKM</b>
<b>20.3. Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma dengan sasaran memberikan pendidikan keterampilan dan bantuan bimbingan moral untuk pengembangan usaha ekonomi sesuai potensi keahlian</b>	12 Panti	Dinas Sosial
<b>20.4. Pembinaan Panti Asuhan</b>	460 Org	Dinas Sosial Dinas Koperasi dan UKM Dinas Tenaga Kerja Transkep
<b>20.5. Pembinaan Eks Narapidana, Pekerja Seks, Narkoba dan penyakit sosial lainnya dengan sasaran memberikan pendidikan keterampilan dan bantuan bimbingan moral untuk pengembangan usaha ekonomi sesuai potensi keahlian</b>	100 % (165 Paket)	Dinas Sosial Badan Kesbang Polinmas.
21. Memperkuat kesiapan dalam penanggulangan bencana alam dan berbagai dampak yang terjadi;	175 Unit	Dinas Sosial Dinas Pemuda dan Olahraga Sejda
<b>22. Memperkuat lembaga pemberdayaan kesejahteraan sosial</b>	100 % (3 paket)	Dinas Sosial
22.1 Pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial dengan meningkatkan partisipasi sosial (karang taruna, pekerja sosial masyarakat, dan organisasi sosial) dalam pelaksanaan usaha kesra sosial	22.2 Pengelolaan Areal Pernakaran dengan menyediakan sarana, prasarana dan pemberian penzinan	
23. Mengembangkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);	100 % (10 Paket)	Badan PMPD Dinas Pendidikan, Badan Kesbang Polinmas
24. Meningkatkan implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam ibadah terutama mesjid dan meningkatkan kesadaran masyarakat menuai zakat	85 %	Sejda Badan Kesbang Polinmas

	25. Meningkatkan pendidikan agama dan kegiatan keagamaan serta pelayanan ibadah haji;	25. Peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji (Unit Lembaga)	60 Unit Setda	Dinas Sosial
	26. Meningkatkan upaya implementasi kesalehan sosial di kalangan aparatur pemerintah;	26. Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama aparat pemerintah dalam memecahkan persoalan-persoalan sosial keagamaan	85 %	Dinas Sosial Setda
	27. Memberdayakan perempuan berdasarkan kemandirian berusaha;	27. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	150 Org	Badan Pemberdayaan Perempuan, PA & KB
	28. Melindungi anak dan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan eksplorasi;	28. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak dengan mengurangi kekerasan rumah tangga	100 % (5 Paket)	Badan Pemberdayaan Perempuan, PA & KB
	29. Mengembangkan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;	29. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak dengan meningkatkan pemahaman ibu rumah tangga terhadap pembinaan tumbuh kembang anak dan peran organisasi perempuan	100 % (5 Paket)	Badan Pemberdayaan Perempuan, PA & KB
	30. Membina keluarga supaya sejahtera lahir dan batin;	30. Peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak dengan membina keluarga sejahtera lahir dan batin	100 % (5 Paket)	Badan Pemberdayaan Perempuan, PA & KB
	31. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan kelembagaan pemuda;	31. Peningkatan peran serta kepemudaan dalam aksi bhakti sosial kepemudaan; diklat kepemimpinan, dan pembinaan kepemudaan	36 Organisasi Pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga
	32. Mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda;	32.1 Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	210 Org	Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Koperasi dan UKM
		32.2 Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda, membangun dan memasyarakatkan olahraga masyarakat	100 % (48 Paket)	Dinas Pemuda dan Olahraga Kantor Satpol PP
	33. Membina olahraga masyarakat;	33. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga untuk mengidentifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	85 Cabang Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan
	34. Mensukseskan pelaksanaan PON XVIII Tahun 2012 di Riau;	34. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga dengan membangun sarana dan prasarana olahraga untuk penyelenggaraan PON XVII	1. Pengembangan Bandara SSK II Pekanbaru	Dinas Perhubungan Dinas Pemuda

	Tahun 2012 di Riau serta memelihara sarana dan prasarana olahraga secara rutin pasca penyelenggaraan PON XVIII.	(Perpanjangan runway Km) 2. Pengembangan Bandara Pasir Pangaiaran (ROHUL Km) 3. Pengembangan Bandara Japura (INHU) 4. Pembangunan Jalan & Akses Lingkungan Main Stadium Kampus Unri 5. Pembangunan Jalan Lingkungan Rumbai Sport Center 6. Peningkatan Jalan Akses Dalam Kota Pekanbaru dan Fly Over 7. Peningkatan Jalan Akses PON ke Ibu-kota Kab/Kota 8. Pembangunan Turap Tebing Danau Kebun Nopi 9. Pengembangan Pengelolaan Air Minum di Venus & Ruisunawa 11 TB 10.Pembangunan Sistem Drainase Primer & Sekunder di	dan Olahraga Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pertambangan dan Energi
--	---	---	---

		Main Stadium Kampus Uni & Sport Center Rumbai.
		11. PLTU 2x 100 MW system isolated- PLTD 2 x 10 MW dan 2 x 5 MW di Kab/Kota.
3	Memperkuat Keseimbangan Pembangunan Antar- Wilayah sebagai Kelanjutan Pembangunan Infrastruktur	<p>1. Meningkatkan kerjasama pembangunan antar kab/kota, antar provinsi dan internasional dalam hal penyediaan pelayanan publik, ekonomi, penanaman modal, hukum, dan penyediaan sarana prasarana publik;</p> <p>2. Melaksanakan penataan ruang provinsi dan koordinasi penataan ruang antar kab/kota;</p> <p>3. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang;</p> <p>4. Mengembangkan infrastruktur skala provinsi untuk melayani daerah terpencil</p>
		<p>1. Peningkatan kerjasama antar pemerintah Kab/Kota, Provinsi, Nasional, IMT-GT, Sosek Malindo, DMDI 25 Paket dengan sasaran promosi daerah, penggalian investasi masuk ke Riau dan pemecahan masalah.</p> <p>2. Implementasi tata ruang dan pendataan penyediaan informasi spasial Riau yang handal untuk pemangku kepentingan pembangunan</p> <p>3. Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha</p> <p>4. Pembangunan jalan dan jembatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas Jalan Riau Selatan dari Teluk Kuantan menuju Lubuk Jambi - Smpg IPA Peranap-Lubuk Kandis – Pangkl Kasai – Sei Akar – Bagan Jaya, Enok – Kuala Enok,</li> <li>- Pembangunan Jalan/Jembatan dari Mandah ke Tempuling</li> </ul>
		<p>95 % (25 Paket)</p> <p>Setda Bappeda Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Disperindag</p> <p>100 % (12 Paket)</p> <p>Bappeda Dinas PU Dinas KLPDE Dinas Kehutanan</p> <p>100 % (12 Paket)</p> <p>Bappeda Setda Badan Pelayanan Perizinan Terpadu</p> <p>Baik (Aspal Hot- mix, atau minim- al Agregat C)</p> <p>Baik (Aspal Hot- mix, atau minim- al Agregat C)</p> <p>Baik (Aspal Hot- mix, atau minimal Agregat C)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagan Siapi-Api, Kubu dan Penipahan</li> <li>- Meningkatnya Kualitas Jalan Pasir Pengaraihan menuju Pujud, Mahato, Simpang Manggala menuju Jalan Lintas Timur Sumatera.</li> <li>- Meningkatnya Kualitas Jalan Sorek – Teluk Meranti – Guntung</li> <li>- Meningkatnya Kualitas Jalan Lipat Kain – Lubuk Agung – Batu Sasak</li> <li>- Meningkatnya Kualitas Jalan Dalam Kota Pekanbaru – Kota Dumai</li> <li>- Pembangunan/Penggantian Jembatan pada Ruas Jalan Provinsi dan Jalan Strategis lainnya</li> </ul>	Baik (Aspal Hot-mix, atau minimal Agregat C)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Kualitas Jalan Lipat Kain – Lubuk Agung – Batu Sasak</li> <li>- Meningkatnya Kualitas Jalan Dalam Kota Pekanbaru – Kota Dumai</li> <li>- Pembangunan/Penggantian Jembatan pada Ruas Jalan Provinsi dan Jalan Strategis lainnya</li> </ul>	Baik (Aspal Hot-mix, atau minimal Agregat C)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Kualitas Jalan Lipat Kain – Lubuk Agung – Batu Sasak</li> <li>- Meningkatnya Kualitas Jalan Dalam Kota Pekanbaru – Kota Dumai</li> <li>- Pembangunan/Penggantian Jembatan pada Ruas Jalan Provinsi dan Jalan Strategis lainnya</li> </ul>	Baik (Aspal Hot-mix, atau minimal Agregat C)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Kualitas Jalan Lipat Kain – Lubuk Agung – Batu Sasak</li> <li>- Meningkatnya Kualitas Jalan Dalam Kota Pekanbaru – Kota Dumai</li> <li>- Pembangunan/Penggantian Jembatan pada Ruas Jalan Provinsi dan Jalan Strategis lainnya</li> </ul>	Sesuai Standar Kualitas		
5. Meningkatkan upaya pemeliharaan sarana dan prasarana PU	<p>5.1. Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan Jalan Nasional di Riau/Lintas Timur Sumatera sepanjang 920,96 Km</li> <li>- Pemeliharaan Jalan Provinsi sepanjang 1.128,95 Km</li> </ul> <p>5.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</p>	<p>Dinas PU</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>81,8 % (753,35 Km)</td> <td>37,2 % (419,97 Km)</td> </tr> </table>	81,8 % (753,35 Km)	37,2 % (419,97 Km)
81,8 % (753,35 Km)	37,2 % (419,97 Km)			
6. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi, pendayagunaan air, serta mengendalikan daya rusak air;	<p>6.1. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Lokasi</li> <li>- Luas Daerah Irigasi (Ha)</li> <li>- Luas Daerah Rawa (Ha)</li> </ul> <p>6.2. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai 25 paket</p> <p>6.3. Pembangunan/Rehabilitasi Turab/Talud/Bronjong</p> <p>6.4. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengamanan Erosi Sungai</li> </ul>	<p>Dinas PU</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>55 Desa 12.556 Ha 132.499 Ha</td> <td>95 % (25 paket)</td> </tr> </table> <p>Dinas PU</p> <p>Dinas PU</p> <p>Dinas PU</p>	55 Desa 12.556 Ha 132.499 Ha	95 % (25 paket)
55 Desa 12.556 Ha 132.499 Ha	95 % (25 paket)			
		<p>69.800 M'</p> <p>Dinas PU</p>		

	- Pengamanan Abrasi Pantai	66.000 M'	
6.5.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Pengairan	100 %	Dinas PU Badan Lingkungan Hidup
6.6.	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah: - Air Minum - Air Limbah	3.347 Liter/dt Semua Perusahaan	Dinas PU Badan Lingkungan Hidup
7.	Pembangunan infrastruktur pedesaan dan daerah terpencil: - Air Bersih Pedesaan - Jalan Desa - Rumah Sehat Layak Huni	500 Desa 1500 Desa 10.100 Unit	Dinas PU Badan PMPD
8.	Mengembangkan infrastruktur pedesaan dan daerah terpencil;  8. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi perhubungan;	9 Lokasi 3 Lokasi	Dinas Perhubungan Dinas PU
	8.1 Pembangunan prasarana & sarana perhubungan: - Dermaga penyeberangan - Dermaga Ro-Ro Penyeberangan	100 % (5 Paket)	Dinas Perhubungan Dinas PU
	8.2. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	100 % (5 Paket)	Dinas Perhubungan Dinas PU
	8.3. Peningkatan pelayanan angkutan melalui Suvey load factor dan peningkatan pelayanan angkutan	100 % (5 Paket)	Dinas Perhubungan Dinas PU
	8..4 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas dengan membangun FLLJ / Rambu-rambu	100 % (18 Paket)	Dinas Perhubungan Dinas PU
	8.5. Peningkatan kelayakan kendaraan bermotor (Uji petik)	25 Kali	Dinas Perhubungan Dinas PU
	8.6. Pembangunan sarana dan prasarana telekomuni kasi (terbangunnya fasilitas telekomunikasi yang menjangkau pedesaan)	80 Unit	Dinas Perhubungan Dinas PU
	8.7. Pembangunan fasilitasi komunikasi radio perhubungan (repeater dan alat komunikasi)	7 Paket 5 Paket	Dinas Perhubungan Dinas PU
	8.8. peningkatan fungsi pengawasan terhadap berat kendaraan berserta mutuannya dan kenyamanan bagi petugas jembatan timbang dalam melaksanakan tugas (rehab.UPPKB &Pembangunan UPPKB	1 Paket 2 Paket	Dinas Perhubungan Dinas PU

	8.9. Tersedianya sarana angkutan penyeberangan untuk meningkatkan pergerakan perekonomian masyarakat dan membuka daerah terisolir (Roro)	6 Paket	Dinas Perhubungan
	8.10. Terselenggaranya pengawasan daerah perairan sekitar dermaga dan kelancaran pelaksanaan Undang-undang Pelayaran No.17 tahun 2008	6 Paket	Dinas Perhubungan
	8.11. Tersedianya jenis kapal sungai yang sesuai dengan karakteristik alur yang ada dan tercapainya daerah-daerah terisolir untuk mendistribusikan penduduk dan barang	4 Paket	Dinas Perhubungan
	8.12. Tersedianya alat keselamatan lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan	5 Paket	Dinas Perhubungan
	8.13. Terwujudnya pelayanan jasa angkutan umum yang baik guna mempersiapkan awak kendaraan umum yang berkualitas, disiplin dan bertanggung jawab	10 Orang	Dinas Perhubungan
	8.14. Terlaksananya pembinaan Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota dalam penyelegaraan lalu lintas dan angkutan kota	5 Kegiatan (11 Kab/Kota)	Dinas Perhubungan
	8.15. Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi kepada para pengusaha angkutan umum di Prov. Riau	5 Paket	Dinas Perhubungan
	8.16. Terjaminnya Keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan dan melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan	5 Paket	Dinas Perhubungan
	8.17. Tersedianya data dan rawan kecelakaan (DRK) untuk dasar evaluasi dan tindak lanjut terhadap kondisi daerah yang rawan akan kecelakaan lalu lintas	5 Paket	Dinas Perhubungan
	8.18. Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pemeliharaan fasilitas dan keselamatan lalu lintas	8 Kend. Roda 4 4 Kend. Roda 2 5 Paket PDL	Dinas Perhubungan
	8.19. Menjaga kelancaran dan keselamatan arus lalu lintas angkutan lebaran, natal dan tahun baru	7 Paket	Dinas Perhubungan
	8.20. Meningkatkan pelaksanaan tugas rutin	23 peserta	Dinas

pengawasan (sumber daya manusia)		Perhubungan
8.21. Meningkatkan kualitas sarana pelayanan perhubungan laut	9 Amdal, 3 FS, 17 Pelabuhan, 3 DED, 1 DLKP/DLKR, 1Dok.Masterplan	Dinas Perhubungan
8.22. Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan laut	1 Paket pembinaan 4 Dok. Database, 3 Kapal perintis, 1 Kapal operasi, 1 FS kapal hovercraft, 1 kapal hovercraft	Dinas Perhubungan
8.23. Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan udara	1Dok.Masterplan 1Dok. AMDAL, DLKR, KKOP BKK	Dinas Perhubungan
8.24. Peningkatan dan pengembangan fasilitas transportasi udara	(Ps.Pangarayan Japura, Dumai Tempuling, Siak Kuansing,SSKII)	Dinas Perhubungan
8.25. Terpeliharanya fasilitas bandara	7 Bandara	Dinas Perhubungan
8.26. Terjaminnya keamanan dan keselamatan operasi bandar udara	1 bandara	Dinas Perhubungan
8.27. Tercapainya peran dan fungsi pelabuhan penyeberangan dengan sarana dan prasarana yang telah ada sesuai dengan ketentuan (Trip)	8 bandara, 10 lapter khusus, 11 heliport	Dinas Perhubungan
8.28. Terpeliharanya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan untuk menunjang kegiatan	1296 (Dumai-Tg.Kapal) 864 (Dumai-Malaka), 432 (Dumai-Tg.Medang), 368 (Mengkapan - Kp.Balak)	Dinas Perhubungan
	5 lokasi (Dumai Tg.Kapal, Meng-	Dinas

	operasional penyeberangan	kapan, Kp.Balak)	Perhubungan
8.29.	Tercapainya peran dan fungsi jembatan timbang dengan sarana dan prasarana yang telah ada sesuai dengan ketentuan	4 lokasi (Duri Muara Lembu Rantau Berangin, Ujung Batu Terataik Manuk)	Dinas Perhubungan
8.30.	Tercapainya sistem monitoring yang memadai ke seluruh jambatan timbang	6 lokasi	Dinas Perhubungan
8.31.	Meningkatkan mutu/kualitas penyele.nggaraan diklat dan mengembangkan sistem informasi berbasis e-government	4 Kegiatan	Dinas Perhubungan
8.32.	Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM perhubungan	750 peserta (32 keg.Diklat)	Dinas Perhubungan
8. 33.	Meningkatkannya pengetahuan dan kesadaran pemakai jasa transportasi serta penyedia jasa angkutan tentang keselamatan transportasi, bahaya HIV dan AIDS serta Postel	1200 peserta (18 kegiatan)	Dinas Perhubungan
9.	Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman;	11 Unit	Dinas PU
9.1.	Pengembangan pemukiman (Tersedianya Rumah untuk pekerja, urban renewal, pesantren & masyarakat)		
9.2.	Lingkungan permukiman sehat dengan membangun perumahan swadaya	10.750 Unit	Dinas PU
9.3.	Pemberdayaan komunitas permukiman penduduk di 12 Kab/Kota se- Provinsi Riau	10 Kelompok	Dinas PU
9.4.	Penataan Sistem Pertanahan dengan penataan Kepemilikan pemukiman dan penyelesaian konflik (Kerjasama Badan Pertanahan)	85 % (2 Paket)	Setda
10.	Meningkatkan kerjasama dan pengembangan wilayah perbatasan	5 Provinsi (Sumut, Sumbar, Jambi, Kepri dan Malaysia)	Bappeda Setda
10.1.	Kerjasama pembangunan dengan daerah perbatasan (Provinsi Tetangga dan negara tetangga)	6 Paket	Bappeda Inspektorat
10.2.	Perencanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan daerah	4 Paket	Bappeda
11.	Mengembangkan wilayah strategis, cepat tumbuh dan KEK;		

	Kuala Enok		Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
	12. Meningkatkan iklim dan realisasi investasi pembangunan	12. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi (Jumlah Investor)	5 Investor
	13. Pemerataan pasokan, cakupan dan kualitas layanan infrastruktur energi dan kelistrikan.	13. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikian dan energi - Peningkatan Daya Mampu Pembangkit Listrik Riau (MW)	Dinas Pertambangan dan Energi
4	Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Berbasis Potensi Sumberdaya Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui Perkuatan Koperasi dan UKM sebagai Kelanjutan Pengentasan Kemiskinan	<p>1. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan sasaran memberikan bimbingan teknologi tepat guna ke sejumlah desa/kelurahan</li> <li>- Badan Koordinasi Penyuluhan:</li> <li>- Penyusunan dan penganalisaan data base penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan</li> <li>- Peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan</li> <li>- Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan &amp; kehutanan</li> <li>- Pemberian penghargaan terhadap penyuluhan dan kelompok tani teladan dan berprestasi</li> </ul> <p>1.1. Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan sasaran memberikan bimbingan teknologi tepat guna ke sejumlah desa/kelurahan</p> <p>1.2. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan</p>	<p>1.200 Desa Badan Penyuluhan Terpadu</p> <p>12 Kab/kota 1.000 org</p> <p>1.000 org 12 Kab/kota</p> <p>Pertanian : padi 998.486,27 ton jagung 114.000 ton kedelai 13.300 ton kacang tanah 9.120 ton kacang hijau 4.180 ton Perkebunan : 8.200 Ha</p> <p>Dinas Tanaman Pangan &amp; HUTAN</p> <p>Dinas Perkebunan</p>

		Pertemakan : 300.000 ekor temak ruminan- sia besar (sapi/kerbau)	Dinas Peternakan dan Kes. Hewan
1.3. Pemberdayaan sumber daya pertanian/perkebunan	10.000 KK	Dinas Tanaman Pangan & Hiklura Dinas Perkebunan	Badan Penyuluhan Terpadu
	<p><b>Badan Koordinasi Penyuluhan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan</li> <li>- Peningkatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan</li> <li>- Peningkatan peran komisi penyuluhan dalam mengembangkan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan</li> <li>- Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana penyuluhan</li> </ul>	12 Kab/kota (65 kali) 12 Kab/kota (1.500 orang) 4 kali/Tahun (600 orang) 1.100 unit kendaraan roda 2 15 unit kendaraan roda 4 dan 60 unit alat ukur, 150 unit BPP	
1.4. Pemberdayaan sumber daya pertanian di 10 Kabupaten	100 % (10 Paket)	Dinas Tanaman Pangan & Hiklura Badan Koordinasi Penyuluhan Dinas Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan & Hiklura Badan Koordinasi Penyuluhan Dinas Perkebunan
1.5. Penanggulangan hama dan penyakit:		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman <ul style="list-style-type: none"> <li>Padi</li> <li>Kedelai</li> <li>Ubi Kayu</li> <li>Ubi Jagung</li> <li>Kacang Tanah</li> </ul> </li> <li>- Perkebunan</li> </ul>	94 % 15.000 Ha 150 Ha 500 Ha 1.200 Ha 250 Ha 5.000 Ha Dinas Perkebunan

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peternakan</li> <li>- Perikanan</li> </ul>	3000 Kasus	Dinas Peternakan dan Kes. Hewan
		120.000 Ton	Dinas Perikanan dan Kelautan
	<p><b>1.6. Peningkatan kualitas dan mutu produk hasil pertanian/peternakan</b></p>	10 Macam	Dinas Peternakan dan Kes. Hewan
<b>2.</b> Membangun agribisnis yang mampu meningkatkan nilai tambah, dengan prioritas pada pembangunan industri hilir untuk pengolahan tanaman pangan dan perkebunan berbasis teknologi maju untuk tujuan konsumsi pangan, industri dan bahan energi (biofuel);	<p><b>2.1. Peningkatan produksi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi Buah-buah</li> <li>- Produksi Sawit (Ton/Tahun)</li> <li>- Pembangunan Kebun K2I</li> <li>- Revitalisasi Kebun Karet Tua menjadi Kebun Kakao</li> <li>- Produksi Kelapa (Ton/Tahun)</li> <li>- Revitalisasi Kebun Kelapa Tua</li> <li>- Revitalisasi Karet Rakyat</li> <li>- Produksi perikanan dan kelautan (Ton/Tahun)</li> <li>= Budidaya (Ton/Tahun)</li> <li>= Tangkap (Ton/Tahun)</li> <li>= Pengolahan (Ton/Tahun)</li> </ul>	<p>195.628 8.326.599,33 10.200 Ha 10.000 Ha 1.598.951,21 65.498 Ha 10.000 Ha 265.520,60 129.548,1 102.514,7 33.417,81</p>	<p>Dinas Tanaman Pangan &amp; Htktura Dinas Perkebunan</p>
	<p><b>2.2. Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok tani pekebun</li> <li>- Produksi daging sapi (Kg/tahun)</li> <li>- Produksi perikanan (ton/tahun)</li> </ul>	<p>100 kelompok 8.751.324 180.000</p>	<p>Dinas Perkebunan Dinas Peternakan dan Kes. Hewan Dinas Perikanan dan Kelautan</p>
	<p><b>2.3. Peningkatan dan pemasaran hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan pasar tani</li> <li>- Produksi Daging Sapi</li> </ul>	<p>20 unit 8.751.324 Kg/Th</p>	<p>Dinas Tanaman Pangan &amp; Htktura Dinas Peternakan dan Kes. Hewan</p>

	- Produksi Perikanan	180.000 Ton/Th	Dinas Perikanan dan Kelautan
2.4. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	100 kelompok tani	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan
2.5. Peningkatan pemanfaatan hasil peternakan	300 kelompok tani BATAMAS	Dinas Peternakan dan Kes. Hewan	Dinas Peternakan dan Kes. Hewan
2.6. Revitalisasi pertanian/perkebunan	150.000 Ha	Dinas Tanaman Pangan & Hkltura Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan
2.7. Pembangunan infrastruktur perkebunan	100.000 Ha	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan
2.8. Pemberdayaan penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan	2.552 orang	Dinas Tanaman Pangan & Hkltura Dinas Perkebunan Dinas Peternakan dan Kes. Hewan Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Kehutanan	Dinas Perkebunan
2.9. Optimalisasi Pemanfaatan Terminal Agribisnis Dumai	1. Kerjasama Pemprov dan Kota Dumai. 2. Penunjang KEK	Dinas Tanaman Pangan & Hkltura Dinas Perkebunan Dinas Perikanan dan Kelautan Disperindag	Dinas Kehutanan
3. Meningkatkan aneka usaha non kayu sekitar hutan;	3. Pemanfaatan potensi sumber daya kehutanan untuk kebutuhan Domestik dan Ekspor:	1. Terpenuhinya kebutuhan daerah 77 lokasi 2. Meningkatnya komoditi ekspor 21.043.857 Kg	Dinas Kehutanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. Meningkatkan pengelolaan tanaman hutan	4. Peningkatan Pengelolaan Tanaman Hutan Industri;	185.701,3	Dinas Kehutanan

	- Produksi Kayu Lapis	Ton/Tahun
5. Meningkatkan ketahanan pangan:	<p>5. Peningkatan ketahanan pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan pangan (Ton beras)</li> <li>- Akses (Sapras Pertanian)</li> <li>= Tata Air Mikro (TAM) dan JJTUT</li> <li>= Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES)</li> <li>= Mesin Pompa Air</li> </ul> <p>Pertanian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi pembangunan</li> <li>- Peningkatan IP</li> <li>- 100-200 seluas</li> <li>- 68.108,18 Ha</li> <li>- Rehabilitasi sawah terlantar</li> <li>- sawah terlantar 13.126,85Ha</li> <li>- Cetak sawah baru 18.765,10 Ha</li> <li>- Perkebunan: 2000 Ha</li> <li>- Badan Ketahanan Pangan:</li> <li>- Keamanan pangan</li> </ul> <p>Dinas Tanaman Pangan &amp; Htkitura</p> <p>Dinas Perkebunan</p> <p>Badan Ketahanan Pangan</p> <p>Penanganan daerah rawan pangan di 663 desa</p> <p>200 unit lumbung pangan masyarakat</p> <p>Lembaga distribusi pangan masyarakat di 150 Gapoktan</p> <p>Gerakan peng-anekaragaman</p>	618.710,79 Ton 24.082 Ha 320.000 Ha 43 Unit Dinas Tanaman Pangan & Htkitura Dinas Perkebunan Badan Ketahanan Pangan Penanganan daerah rawan pangan di 663 desa 200 unit lumbung pangan masyarakat Lembaga distribusi pangan masyarakat di 150 Gapoktan Gerakan peng-anekaragaman

	<p>konsunsi makanan desa</p> <p>- Terbinanya desa mandiri pangan 663 desa</p> <p>Pembinaan 50 Kelompok Tani / KWT</p> <p>2200 57 150 unit 2000 52 94</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan pangan (pencapaian ketersediaan energi Kkal/Kap/hari dan protein gr/kap/mal/th)</li> <li>- Distribusi pangan (lembaga)</li> <li>- Konsumsi pangan (pencapaian konsumsi energi Kkal/Kap/hari dan protein gr/kap/hari th - pencapaian skor pola pangan harapan (PPH))</li> </ul> <p><b>Badan Koordinasi Penyuluhan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan dan penerapan sistem, metoda dan materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan</li> <li>- Bimbingan dan penerapan sistem, metoda dan materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan</li> <li>- Penyusunan program dan rencana teknis penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan</li> <li>- Pembinaan, supervisi, monev penyelenggaraan penyuluhan</li> </ul> <p><b>6. Meningkatkan kesejahteraan petani;</b></p> <p><b>6. Peningkatan kesejahteraan petan desa mandiri pangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tununnya pravelensi kerawanan pangan</li> <li>- Tununnya pravelensi gizi buruk dan gizi kurang</li> <li>- Terbentuknya Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LMM)</li> </ul>	<p>16 buku (700 eks/tahun)</p> <p>12 Kab/kota (8.340 orang)</p> <p>12 Kab/kota (150 BPP/tahun)</p> <p>12 Kab/kota (150 BPP/tahun)</p> <p><b>Badan Ketahanan Pangan:</b></p> <p>663 desa &lt; 0,5 %</p> <p>60 Pondok Pesantren Peternakan:</p>
--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrasi tanaman sawit dan ternak sapi (SISKA) di lahan kebun sawit</li> </ul>	100.000 ekor sapi pada 50.000 Ha	Dinas Peternakan dan Kes. Hewan
7. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan;	7.1. Pengembangan budi daya perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah kerambah penyebaran bibit ikan</li> </ul> <p>Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perikanan budida ya 129.548,1 ton</li> <li>- Olahan hasil budida ya 12.954,81 ton</li> <li>- Peningkatan: Jumlah benih ikan 2.000.000 ekor</li> <li>- Induk/calon induk 420 ekor</li> <li>- Saprokan 22 ton</li> <li>- Kualitas instruktur &amp; masyarakat perikanan 1.749 orang</li> </ul> <p>Pengembangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LPPMHP Dumai 80 paket</li> <li>- KJA di Das Kampar Indragiri dan Rokan 30.000.</li> <li>- KJA di perairan laut 1.500 unit</li> <li>- Budidaya ikan tambak 1.086,4 Ha</li> <li>- Saluran irigasi tam-bak 3.025,1 Km</li> <li>- Budidaya ikan</li> </ul>	100.000 ekor sapi pada 50.000 Ha	Dinas Perikanan dan Kelautan

		<p>kolam 684 Ha. Budidaya ikan Mina Tani 349 Ha Saluran irigasi budidaya ikan (Sari ban) 70 Km.</p>	
	7.2. Pengembangan perikanan tangkap pada 2 (dua) Kabupaten Kampar dan Pelalawan (2 lokasi)	<p>Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 102.514,7 Ton</li> <li>- Olahan hasil tangkap 20.503 Ton</li> <li>- Terdapat 160 kapal motor di Tanjung Samak</li> </ul>	Dinas Perikanan dan Kelautan
	8. Meningkatkan kegiatan budaya perikanan dan kelautan, wawasan maritim masyarakat pesisir Riau;	8. Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim masyarakat (5 kegiatan)	Kemandirian Pokmaswas di 11 lokasi
	9. Memberdayakan masyarakat pesisir dalam perekonomian sumberdaya perikanan & k lautan;	9. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui koperasi dan UKM	50 Unit Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Kop & UKM
	10. Memperkuat kelembagaan & usaha, kapasitas SDM, sistem pembayaran, dan peluang pasar KUKM;	<p>10.1. Program perencanaan pembangunan ekonomi dan Promosi</p> <p>10.2. Peningkatan iklim investasi dan Realisasi Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iklim investasi dengan memberikan keamanan dan perizinan bekerjasama dengan Kabupaten/Kota</li> <li>- Meningkatkan realisasi investasi</li> <li>- Pencapaian kepuasan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan (nilai IKM)</li> </ul> <p>10.3. Penyajian Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah untuk menunjang Investasi di Provinsi Riau</p>	<p>100 % Bappeda</p> <p>95 % Badan Penanaman Modal dan Industri</p> <p>100 % Badan Penanaman Modal dan Industri 85 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu</p> <p>80 % Badan Penanaman Modal dan Industri</p>

	10.4. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif koperasi, usaha mikro, kecil & menengah	1.750 orang	Dinas Koperasi & UKM
	10.5. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	10 KUKM	Dinas Koperasi & UKM
	10.6. Pembinaan dan pengembangan BUMD dan lembaga keuangan non perbankan (Unit)	60 unit	Dinas Koperasi & UKM
	10.7. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1.500 koperasi	Dinas Koperasi & UKM
	10.8. Perkuatan pemodal dan usaha mikro kecil dan menengah	Rp.30.Miliar	Dinas Koperasi & UKM
	10.9. Pembinaan dan pengembangan koperasi dan wirausaha	1.250	Dinas Koperasi & UKM
	10.10. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) koperasi dan UKM	1.800 orang	Dinas Koperasi & UKM
	10.11. Fasilitasi pemodal dan usaha pertanian/peternakan kelembaga-lembaga pembiayaan	200 kelompok temak	Dinas Peternakan dan Kes. Hewan
11. Meningkatkan daya saing industri:	11.1 Pengembangan industri menengah dan besar - Peningkatan kapasitas IPTEK Produksi 25 Paket	100 % (25 Paket)	Badan Peranaman Modal dan Promosi Dinas Kop & UKM
	11.2 Pengembangan industri kecil dan menengah - Sentra Pendamping Langsung - Peningkatan kualitas Fungsional Penyaluh	10 Unit 115 Org	Dinas Koperasi & UKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	11.3. - Penataan struktur dan peningkatan kemampuan teknologi industri bagi Pengrajin - Peningkatan Kualitas Instruktur Diklat	1.922 Org 250 Org	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar dalam dan luar	12.1. Program peningkatan dan pengembangan eksport - Meningkatnya Laju Pertumbuhan Eksport - Laju pertumbuhan impor	13,50 % 9,73 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	negeri;	12.2 Pengembangan sistem perdagangan dalam negeri; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terciptanya Iklim Usaha Kondusif Pengembangan Pasar Tradisional</li> <li>- Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri</li> <li>- Peningkatan Komoditi Transaksi Pasar Lelang</li> </ul>	90 % 45 Unit 80 % 50 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	13. Meningkatkan perlindungan konsumen;	13.1. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peneraan UTTP (Unit)</li> <li>- Advokasi Perlindungan Konsumen</li> <li>- Penyelesaian Sengketa Konsumen</li> </ul>	137.000 Unit 23 % 80 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	14. Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata via pengembangan produk wisata yang unik, tradisional, dan mencerminkan jati diri masyarakat Riau.	13.2. Peningkatan akses informasi harga pasar produk pertanian/peternakan di pedesaan	500 desa	Dinas Peternakan dan Kes. Hewan
		14.1 Pengembangan destinasi pariwisata (jumlah Objek Unggulan)	12 Kab/Kota (14 obyek)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		14.2 Pengembangan pemasaran pariwisata (Meningkatkan promosi wisata dalam dan luar negeri)	Sumut,Sumbar, Kepriau,Bali. ASEAN, China, Belanda	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	15. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya mineral, energi dan batubara	15. Pengelolaan dan fasilitasi mineral, batubara dan energi	1 unit terakreditasi oleh BAN 20 set peralatan labor & tambang, migas dan listrik	Dinas Pertambangan dan Energi
5	Meningkatkan penanaman modal untuk mendukung pertumbuhan perekonomian	1. Mengembangkan wilayah strategis strategis, cepat tumbuh, dan kawasan ekonomi khusus;	1. Paket dokumen PKN Pekanbaru, Dumai & Kuala Enok 2. Paket Dokumen PKW Provinsi Riau	Bappeda Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah

		<b>3. Paket Dokumen PKL Provinsi Riau</b>
<b>2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menjadikan investasi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah</b>	<b>2. Peningkatan iklim investasi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi peranaman modal</li><li>- Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang dikeluarkan</li><li>- Rerata Waktu Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan</li></ul>	<b>Badan Peranaman Modal dan Promosi Daerah</b> <b>Badan Pelayanan Perizinan Terpadu</b> 35.000 Miliar (US) 4.380 Perizinan 10 hari
<b>3. Meningkatkan upaya promosi dan kerjasama investasi dalam rangka mempercepat pertumbuhan perekonomian</b>	<b>3.1. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi</b>  <b>3.2. Penyelesaian proses perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan</b>	<b>Badan Peranaman Modal dan Promosi Daerah</b> 75 paket 12.080
<b>4. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan untuk menunjang percepatan pertumbuhan investasi di daerah</b>	<b>4.1. Peningkatan akuntabilitas perizinan dan non perizinan</b>  <b>4.2. Penertiban, monitoring, evaluasi dan penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan</b>	<b>Badan Pelayanan Perizinan Terpadu</b> 4.380 izin/non izin 90 Indek kepuasan masyarakat
<b>5. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi melalui Perdagangan</b>	<b>5.1. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Eksport dan Impor</b>  <b>5.2. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Asongan</b>  <b>5.3. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	<b>95 %</b> <b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b> <b>95 %</b> <b>100 %</b>  <b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>
<b>6. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi melalui Perindustrian</b>	<b>6.1. Peningkatan kemampuan Teknologi Industri dan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi</b>  <b>6.2. Penataan Struktur Industri termasuk Industri Kecil dan Menengah</b>  <b>6.3. Pengembangan Sentra Industri Potensial</b>	<b>120 Org</b>  <b>Perjasama Prov/Kab/Kota dengan Kadın</b> <b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b> <b>1. Kawasan Eko-</b>

	<b>8. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal</b>	<b>8.1 Percepatan Pembangunan pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal</b>	628 Desa	Bapedda
		<b>8.2 Percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan Daerah tertinggal</b>		
		<b>8.3 Percepatan pembangunan kawasan produksi Daerah tertinggal</b>		
		<b>8.4 Percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah Tertinggal</b>		
		<b>8.5 Percepatan pembangunan wilayah perbatasan</b>		
		<b>8.6 Percepatan pembangunan Daerah tertinggal dan Khusus</b>		
7	<b>Mewujudkan Budaya Melayu menjadi Payung Kebudayaan Daerah dan Alat Pemersatu Berbagai Budaya yang ada di Provinsi Riau</b>	<p>1. Menghidupkan sentra-sentra pendidikan kebudayaan Melayu melalui pendidikan non formal</p> <p>2. Meningkatkan kualitas dan muatan kurikulum pendidikan kemelayuan di dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah</p>	<p>1. Pendidikan non formal dengan membentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah sentra pendidikan kebudayaan Melayu</li> <li>- Jumlah kebutuhan sarana prasarana kebudayaan Melayu</li> </ul> <p>2. Pengembangan Kurikulum Budaya Melayu pada Satuan pendidikan dasar (Kab/Kota) 12 Paket</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan menengah (Kab/Kota) 12 Paket</li> <li>- Pendidikan tinggi (Negeri/Swasta) 2 Paket</li> </ul> <p>3. Meningkatkan khasanah kepustakaan melayu dengan pengembangan budaya baca</p> <p>4. Memberdayakan masyarakat pedesaan yang berciri khas Melayu</p>	<p>Dinas Pendidikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Memadai</p> <p>Dinas Pendidikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (12 paket)</p> <p>Dinas Pendidikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (12 paket)</p> <p>Dinas Pendidikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (12 paket)</p> <p>Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (10 Paket)</p> <p>Dinas Pendidikan, Balitbang, Dinas Kebudayaan 100 % (4 Paket)</p>

				dan Pariwisata
	4.2. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan bercri khas melayu	149 kelembagaan / adat	Badan PMPD	
5.	Pengembangan nilai-nilai budaya dengan menghimpun gagasan tentang budaya melayu guna mendinamisasikan nilai luhur Kebudayaan Melayu untuk mewujudkan keséjahteraan masyarakat 6 Paket	100 % (6 Paket)	Balibang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
6.	Pengelolaan kekayaan budaya dengan sasaran meningkat penelitian kebudayaan dan Optimalisasi pengakuan atas hak kekayaan Intelektual (HAKI) seni dan budaya melayu	100 % (17 Riset/HAKI)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
7.	Pengelolaan keragaman budaya dengan sasaran mewujudkan kerukunan dan rasa kebersamaan antar anggota, kelompok masyarakat dalam mewujudkan Provinsi Riau sebagai i kawasan yang aman dan maju dalam kawasan Asia Tenggara, dan Internasional	100 % (30 Paket)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
8.	Mengembangkan daerah tujuan wisata yang memiliki ciri khas Budaya Melayu sebagai Bagian Kebudayaan Nasional	12 Desa Wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	8.1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Objek-Objek Wisata) di Tingkat Nasional & Internasional	100 % (12 Event)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	8.2. Pengembangan Destinasi Pariwisata (event-event wisata tradisional bertaraf nasional/internasional	100 % (12 Event)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	8.3. Pengembangan Kerjasama Pariwisata Provinsi Riau (Melakukan kerjasama dengan Kab/Kota, Provinsi Tetangga dan negara Asean)	12 Kab/Kota 4 Negara (China Malaysia, Thailand, Singapura) 4 Provinsi tetangga Sumut,Jambi Sumbar, Kepri.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
8.	Meningkatkan kualitas lingkungan dan perlindungan lingkungan	1. Metaksanakan pemulihhan dan konservasi sumberdaya air, udara, hutan, lahan, ekosistem pesisir dan laut dengan mengendalikan pencemaran dan perusakan	1. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 2. Pengendalian kebakaran hutan dengan sasaran kasus kebakaran hutan/Lahan yang perusakan	100 % (3 Kasus) 100 % Badan Lingkungan Hidup

	lingkungan	terjadi setiap tahun	
2.	<b>Meningkatkan kemampuan manajemen peringkatan kualitas lingkungan hidup</b>	<p>2.1 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut untuk kesejahteraan masyarakat sekitar pesisir</p> <p>2.2 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan di setiap SKPD dan di lingkungan Pemerintah Kab/Kota</p> <p>2.3 Peningkatan Pengendalian Polusi</p>	<p>8 lokasi kawasan konservasi</p> <p>Badan Lingkungan Hidup Dinas Perikanan dan Kelautan</p> <p>44 SKPD dan 12 Kab/Kota</p> <p>Badan Lingkungan Hidup</p>
3.	<b>Rehabilitasi, konservasi, dan perlindungan hutan dan lahan</b>	<p>3.1. Program rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup</p> <p>3.2. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam (Unit SKPD Prov/Kab/Kota)</p> <p>3.3. Rehabilitasi hutan dan lahan</p> <p>3.4. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan</p> <p>3.5. Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan</p> <p>3.6. Penanggulangan gangguan usaha perkebunan dan perlindungan masyarakat</p> <p>3.7. Pengembangan Ruang Hijau Terbuka (RHT) dengan melakukan kerjasama dengan Kab/Kota</p> <p>3.8. Penyaluran dan penyebaran bahan informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan</p>	<p>100 % (15 Paket)</p> <p>27 SKPD</p> <p>Badan Lingkungan Hidup Badan Koordinasi Penyuluhan</p> <p>5.270 Ha</p> <p>Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan</p> <p>50 lokasi</p> <p>perusahaan</p> <p>100 % (12 Kab/Kota)</p> <p>75.000 lembar 15.000 rekom</p> <p>26 perusahaan pemegang KP-KP2B</p>
4.	<b>Melakukan pemantauan, penelitian &amp; pengkajian mengenai produksi pertambangan, energi, air bawah tanah &amp; migas</b>	<b>4. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan</b>	

		5. Mewujudkan pengawasan dan penertiban pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan dan energi	5. Pengawasan dan penertiban pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	- 12 lokasi wilayah tambang rakyat - 9 lokasi perusahaan batubara/gambut,mineral	Dinas Pertambangan dan Energi Badan Lingkungan Hidup
9	Meningkatkan Kemampuan Penanganan Permasalahan Regional dan Global secara Terpadu dan Berkesinambungan	<p>1. Meningkatkan koordinasi kerjasama wilayah perbatasan dan internasional;</p> <p>2. Memantapkan penanganan lingkungan hidup yang berdampak negatif dan mengantisipasi dampak global</p> <p>3. Meningkatkan pemantauan teknologi komunikasi dan informatika dan antisipasi dampak negatif;</p> <p>4. Meningkatkan jiwa nasionalisme di seluruh lapisan masyarakat;</p> <p>5. Mewujudkan pengawasan dan penertiban pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan dan energi</p>	<p>1. Kerjasama pembangunan regional dan global secara terpadu dan berkesinambungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penuntasan kasus perbatasan</li> <li>- Penyelesaian permasalahan untuk mengatasi masalah regional dan global</li> <li>- Investor masuk melalui kerjasama IMT-GT, Sosek Malindo dan DMDI</li> </ul> <p>2. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</p> <p>3. Pengajaran dan penelitian bidang informasi dan komunikasi</p> <p>4.1 Pengembangan wawasan kebangsaan melalui program pelatihan</p> <p>4.2. Pendidikan politik bagi masyarakat melalui program pelatihan</p> <p>5. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat</p> <p>6. Pengembangan perikanan tangkap bagi nelayan Riau di perairan pantai timur Sumatera/Selat Melaka</p> <p>7. Meningkatkan eksistensi keberadaan kawasan hutan</p>	<p>80 % 100 % (5 Paket) 8,23 %</p> <p>100 % (2 Kasus)</p> <p>100 % (25 hasil riset)</p> <p>100 % (5 Paket)</p> <p>100 % (14 Paket)</p> <p>10 kapal motor</p> <p>20 lokasi</p> <p>21 lokasi</p>	<p>Bappeda Setda</p> <p>Badan Lingkungan Hidup</p> <p>Balitbang Badan Kesbang Polinmas</p> <p>Badan Kesbang Polinmas</p> <p>Badan Kesbang Polinmas Kantor Satpol PP</p> <p>Dinas Perikanan dan Kelautan</p> <p>Dinas Kehutanan</p> <p>Dinas Kehutanan</p>

# **BAB X**

---

---

---

## **BAB X**

## **P E N U T U P**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009-2013 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Nasional Tahun 2005 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nasional Tahun 2004 - 2009, serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025, yang memuat Visi dan Misi Gubernur Riau Tahun 2008 - 2013. RPJMD Provinsi Riau ini merupakan rencana pembangunan yang berkesinambungan dari Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Provinsi Riau 2003 - 2008.

### **A. Pedoman Transisi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2009-2013 akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan sampai dengan Tahun 2013. Sedangkan untuk mengisi kekosongan perencanaan pembangunan tahun 2014 maka di dalam RPJMD Provinsi Riau 2009 - 2013 ini disusun perencanaan pembangunan transisi untuk tahun 2014. Proses ini merupakan upaya untuk memayungi perencanaan dan program pembangunan tahun 2014, yang memuat visi dan misi kepala daerah hasil pemilihan Tahun 2013. Program transisi tersebut tetap mengacu pada program prioritas untuk menuntaskan permasalahan kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur (K21) pedesaan dan program strategis lainnya sebagaimana tercantum pada bab sebelumnya.

---

## B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2009 - 2013 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah Tahunan, perencanaan penganggaran dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menyusun RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahunan dan perencanaan penganggaran.

RPJMD Provinsi Riau Tahun 2009 - 2013 akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau untuk tahun 2009, 2010, tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013. Sehubungan dengan ini akan ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) RPJMD Provinsi Riau Tahun 2009 - 2013 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Gubernur dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- 2) RPJMD Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013 dilaksanakan dengan koordinator Sekretaris Daerah, sebagai pelaksana harian penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) RPJMD Provinsi Riau Tahun 2009 - 2013 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Provinsi Riau.
- 4) Program-program yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2009 - 2013 dilaksanakan secara operasional oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang didukung Instansi vertikal yang ada di Wilayah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha. Oleh karena itu, SKPD Provinsi Riau wajib menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- 5) RPJMD Provinsi Riau Tahun 2009 - 2013 merupakan panduan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dalam menyusun RPJM Kabupaten/Kota

- 
- dalam menyusun visi, misi, dan program Bupati/Walikota, serta berfungsi untuk menyusun Rencana Strategis SKPD Kabupaten/Kota;
- 6) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009 - 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 - 2013 ke dalam Rencana Strategis SKPD Provinsi Riau dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
  - 6) Pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau tahun 2009 - 2013 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau agar terwujud prinsip keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.
  - 7) Evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2009 - 2013 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Gubernur terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Riau.
  - 8) Mengingat masa bhakti Gubernur/Wakil Gubernur akan berakhir pada tahun 2013 maka untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah yang ada, dipandang perlu untuk menyusun RPJMD Provinsi Riau masa transisi tahun 2014.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2009 - 2013, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintahan, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau serta pemangku kepentingan lainnya, yang ditunjukkan dari ketercapaian indikator kinerja daerah sebagaimana ditetapkan pada bab sebelumnya.